

**STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI LAMPUNG
DALAM MENGHADAPI LAMPUNG ZONA MERAH NARKOBA
(Studi Pada Kalangan Remaja)**

Skripsi

Oleh

TIARA RIFANY



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI LAMPUNG DALAM MENGHADAPI LAMPUNG ZONA MERAH NARKOBA

(Studi Pada Kalangan Remaja)

Oleh

Tiara Rifany

Lampung sebagai provinsi peredaran narkoba yang tinggi dinyatakan sebagai zona merah narkoba sejak 2015. Untuk itu diperlukan strategi yang baik dalam penanganan masalah narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung khususnya dikalangan remaja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa; 1) strategi yang dilakukan oleh BNNP Lampung dalam menghadapi Indonesia darurat narkoba dan mengetahui tingkat penurunan angka pecandu melalui strategi yang dilakukan; 2) hambatan-hambatan yang dihadapi BNNP Lampung dalam mengimplementasikan strategi. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) strategi yang dilakukan BNNP Lampung melalui program yang disusun secara sistematis dan didalamnya terdapat bentuk kegiatan nyata dari program-program tersebut; 2) anggaran yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka untuk pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan dan prosedur kerja yang dilakukan BNNP Lampung.

Peneliti merekomendasikan beberapa hal, yaitu; 1) hendaknya upaya penanggulangan narkoba tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, akan tetapi juga dibutuhkan partisipasi masyarakat; 2) melakukan pemetaan terhadap daerah rawan narkoba serta memperluas sosialisasi; 3) kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba harus lebih ditingkatkan sehingga mempercepat tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba; 4) melakukan kegiatan nyata dari pembentukan satgas anti narkoba dikalangan remaja dan 5) penambahan dana dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program BNNP Lampung.

Kata kunci : strategi, strategi implementasi, penanggulangan narkoba

ABSTRACT

STRATEGY NATIONAL NARCOTICS AGENCY OF LAMPUNG PROVINCE IN FACE LAMPUNG RED ZONE OF DRUGS

(Studies Of Teenagers Circle)

By

Tiara Rifany

Lampung as province who used of drugs high and lampung as red zone of drugs since 2015. It required a good strategy to handling the drugs problem by the National Narcotics Agency of Lampung Province especially in teenagers circle. The goals of this research are to analysis; 1) strategy that BNNP Lampung does in facing emergency drugs of Indonesia and knowing about decrease in the number of addicts through the strategy; 2) obstacles encountered in the implementation of the BNNP Lampung's strategy. Type of the research is descriptive research type with qualitative approach. Data collected by interview, observation and documentation. The result of this research are; 1) strategies undertaken through the program by BNNP Lampung systematically arranged and in which there is a real form of activity of the programs; 2) the budget systematically arranged in the form of figures for the implementator of the programs which has been established and work procedures that BNNP Lampung.

Recommend research a few things; 1) drug prevention efforts shouldn't only be done by the government alone, but also required the participation community; 2) mapping the drug-prone areas as well as expand the dissemination; 3) dissemination activities about the dangers of drug abuse should be increased so as to accelerate the level of public awareness of the dangers of drugs; 4) conduct real activities of formation of the anti-drug task force among teenagers and 5) additional funds and human resources in the implementation of the BNNP Lampung's program.

Keywords : strategy, strategy implementation, combating drugs

**STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI LAMPUNG
DALAM MENGHADAPI LAMPUNG ZONA MERAH NARKOBA
(Studi Pada Kalangan Remaja)**

**Oleh
TIARA RIFANY**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

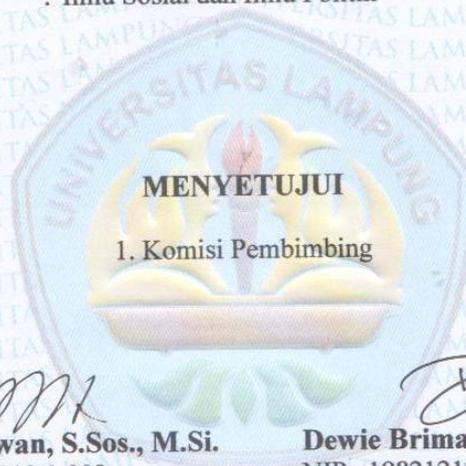
Judul Skripsi : **STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI LAMPUNG DALAM MENGHADAPI
LAMPUNG ZONA MERAH NARKOBA
(Studi pada Kalangan Remaja)**

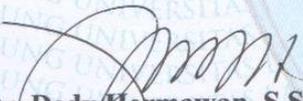
Nama Mahasiswa : **Tiara Rifany**

No. Pokok Mahasiswa : 1216041104

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

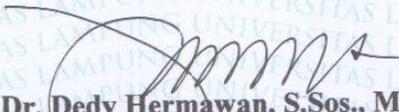
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
NIP 19750720 200312 1 002

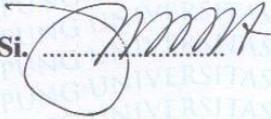

Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.
NIP 19821212 200801 2 017

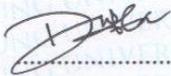
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

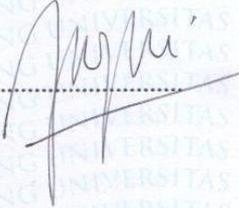

Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
NIP 19750720 200312 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.** 

Sekretaris : **Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.** 

Penguji Utama : **Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si.** 

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya, M.Si.
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **28 Oktober 2016**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 25 Oktober 2016

Yang membuat pernyataan,



Tiara Rifany
NPM. 1216041104

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Tiara Rifany, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 28 September 1994. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Hi.Ganggaram (Alm) dan Ibu Hj.Etty Rohaty. Memulai jenjang pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) Fransiskus Xaverius Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2000. Selanjutnya pada tahun 2006 menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Kartika Jaya II-5 Bandar Lampung. Pendidikan selanjutnya yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 25 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2009. Kemudian penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) YP Unila Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2012.

Pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswi pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung. Penulis diterima melalui jalur Ujian Mandiri (UM) dan tergabung dalam Himupunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA). Pada Tahun 2015 di pertengahan bulan Juli, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Negeri Mulyo, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan selama 40 hari.

Persembahan

Bismillahirrohmanirohim

Dengan menyebut nama Allah SWT

*Dengan ketulusan dan kerendahan hati, ku panjatkan rasa syukur atas
karunia-Mu kepadaku*

Kupersembahkan Karya ini kepada:

(Alm) Ba' dan Mamah tercinta serta Kakak-kakak ku tersayang.

*Terima kasih untuk ketulusan hati dalam memberikan kasih sayang yang tak
terbalaskan, doa yang tiada henti dalam menanti keberhasilanku, serta
dukungan yang kalian berikan.*

Sahabat dan Teman-temanku yang selalu mendukungku.

Para Pendidik Tanpa Tanda Jasa yang Ku Hormati

Alamamater tercinta

MOTTO

Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan). Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karuniaNya kepadamu, lalu (hati) kamu menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk.

(Surat Adh-Dhuha Ayat 3-8)

Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya “Jadilah”, lalu jadilah dia.

(QS. Ali Imran:47)

Doa yang kita ucapkan diiringi dengan usaha yang kita lakukan akan sebanding dengan hasil yang kita peroleh.

(Tiara Rifany)

SANWACANA

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin tercurah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tak lupa shalawat serta salam penulis ucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sang motivator bagi penulis untuk selalu ikhlas dan bertanggung jawab dalam melakukan segala hal. Atas kehendak dan kuasa Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Dalam Menghadapi Lampung Sebagai Zona Merah Narkoba (Studi Pada Kalangan Remaja)”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

2. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara sekaligus dosen pembimbing utama bagi penulis. Terima kasih Pak atas ilmu, saran, waktu, dukungan serta kesabarannya dalam membimbing penulis selama proses bimbingan skripsi. Penulis benar-benar berterima kasih dan merasa terbantu sekali dengan proses bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP, M.Si. selaku dosen pembimbing kedua bagi penulis. Terima kasih Bu atas ilmu, saran, waktu, dukungan serta kesabarannya dalam membimbing penulis selama proses bimbingan skripsi. Penulis benar-benar berterima kasih dan merasa terbantu sekali dengan proses bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Novita Tresiana S.Sos, M.Si selaku dosen pembahas. Terima kasih Bu atas arahan, saran, kritik, masukan, nasihat serta waktu yang telah banyak membantu penulis. Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini juga berkat bantuan dari Ibu
5. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos, M.AP selaku dosen pembimbing akademik (PA). Terima kasih untuk saran, nasihat, motivasi dan ilmu yang bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis untuk memotivasi penulis untuk menjadi lebih baik dalam mencapai kesuksesan.
6. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara, terima kasih atas semua ilmu yang telah penulis peroleh selama proses perkuliahan. Semoga dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan penulis kedepannya.
7. Ibu Nur selaku Staf Administrasi yang banyak membantu kelancaran administrasi skripsi hingga terselesaikan.

8. Pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung (BNNP Lampung), Direktorat Reserse Narkoba POLDA Lampung dan Masyarakat yang sudah banyak membantu dalam kelancaran penelitian ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk dapat memberikan informasi terkait dengan skripsi ini.
9. (Alm) Ba' dan Mamah tercinta. Terimakasih telah membimbingku sejak kecil hingga saat ini dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, terimakasih atas keikhlasan dan ketulusan serta doa yang tidak pernah henti yang kalian berikan. Ba dan Mamah selalu menjadi penyemangat untuk aku dalam mencapai kesuksesan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang indah untuk Ba dan Mamah di dunia dan di akhirat kelak. Amin
10. Kakak-kakak ku, (Kak Gandhi, Kak Angga dan Kak Fery). Terimakasih atas segala bantuan, semangat, doa dan dukungan yang sangat besar kepada aku. Semoga kalian selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
11. Keponakanku Garrry Fazilla Irawan. Terimakasih sudah menghibur *anin* dengan tingkahnya walaupun terkadang suka *nyebelin*.
12. Oldga Ayu PM, Desti Jawa dan Dian Ndut. Terimakasih buat kalian yang sudah menjadi partner sejak SMA terutama buat Oldga terimakasih buat saran-saran yang diberikan, suka menyediakan tempat buat skripsian hehe semoga *plan* kita jalan ya!Amin. Jawa dan Ndut terimakasih atas dukungan yang kalian berikan dari jauh sana. Kangen kumpul berempat! Semoga kita semua menjadi orang sukses. Amin
13. Apriady Triatmaji (Jibon) dan Maldi Wijaya (Pakde). Terimakasih sampai saat ini kalian masih ada buat enteng, selalu menghibur dengan tingkah

kalian berdua. Bon, jangan lupa kuliah! Pakde, buru bimbingan biar cepet kelar skripsian, jangan males!

14. Hindun, Riska, Uwi, Tia (Tiul), Khanza, Ana, Uti. Terimakasih atas doa dan semangat yang kalian berikan untukku selama ini. Uwi dan Khanza semangat skripsiannya! Semoga impian kita semua dapat tercapai. Amin
15. Sahabat-sahabatku (Aliza, Ayu, Emi, Shella dan Hanbul). Aliza Puspita yang pemberani tapi baperan haha. Ayu Tsanita yang menjadi emak bagi anak-anaknya (MM) haha baik banget dan suka dirempongin kami. Emi Martha si centil yang selalu heboh dan ajaib selalu hoki pokoknya. Ria Shelawati yang selalu menjadi kompor diantara MM, yang paling update dan selalu mendengarkan curhatan. Widji Ramadhani yang kalem, pintar, hokian juga, suka nebengin kalau mau kuliah dan selalu menjadi partner drama korea ya bul. Terimakasih sudah menjadi bagian dari hidupku selama perkuliahan ini. Terimakasih atas kebersamaan, canda tawa, suka duka, bantuan dan dukungan yang kalian berikan. Semoga impian kita dapat terwujud dan segala wacana kita dapat terealisasikan dalam waktu dekat! Amiiin. *Loveyou guys! See u on top MM!*
16. *My chilies* (Yoanita Mesuji dan Mutiara). Yoanita yang selalu menghadapi masalah dengan tenang, Mutiara yang selalu mageran dan sebentar lagi dipinang hahah. Terimakasih untuk kalian yang selalu hadir dengan canda tawa, suka duka, dukungan untukku sehingga MM terasa lengkap dengan adanya kalian. *Loveyou Chile! See u on top!*
17. Terimakasih teman-teman ANE12 (AMPERA), Maya, Sylvi, Umay, Dilla, Lianse, Icup, Ipul, Kiki, Yogi, Ali, Intan, Olip, Ghege, Dianisa, Anisa, Ica, Ikhwan, Cibi, Dhanu, Nadiril, Taufiq, Novi, Suci, Dara, Pewe, DianKp,

Imah, Bayu, Bery, Akbar, Ayu Widya, Silvia Tika, Eko, Fajar, Aris, Ajeng, Nisul, Betty, Alan, Merita, Putu, Elin dan yang lainnya. Terimakasih atas bantuan, kebersamaan, candatawa, dukungan dan pengalaman yang diberikan kepada penulis. Tetap semangat buat kita dan sukses buat kita semua AMPERA! Amin.

18. ANE'11 (Mbak Vike, Mbak Ninda dan Mbak Raras), ANE'14 (Tika, Ala, Emon, Kartika, Nita, Wulan dan Tulva). Terimakasih atas saran dan dukungan yang diberikan kepada kepada penulis. Semangat buat Ala dkk skripsiannya ya.
19. Teman-teman KKN Desa Negeri Mulyo (Senja, Dyra, Anggun, Salman, Faxy, Yudha dan Nanda). Terimakasih atas kebersamaannya selama 40 hari.
20. Keluarga besar Universitas Lampung yang telah membantu saya selama saya kuliah di Universitas Lampung.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi saya berharap kiranya karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Bandar Lampung, 28 Oktober 2016
Penulis

Tiara Rifany

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|----------------------------|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 10 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| A. Tinjauan Tentang Strategi | 11 |
| 1. Pengertian Strategi | 11 |
| 2. Jenis-Jenis Strategi | 14 |
| 3. Fungsi Strategi | 17 |
| B. Tinjauan Tentang Manajemen Strategi | 18 |
| 1. Pengertian Manajemen Strategi | 18 |
| 2. Karakteristik Manajemen Strategi | 21 |
| 3. Dimensi Manajemen Strategi | 22 |
| 4. Manfaat Manajemen Strategi | 23 |
| 5. Tahap Proses Manajemen Strategi | 25 |
| 6. Model Manajemen Strategi..... | 26 |
| C. Tinjauan Tentang Implementasi Strategi..... | 33 |
| 1. Pengertian Implementasi Strategi..... | 33 |
| 2. Model Implementasi Strategi | 35 |
| 3. Faktor Implementasi Strategi | 41 |
| 4. Indikator Keberhasilan Implementasi Strategi | 43 |
| D. Tinjauan Tentang Remaja | 44 |
| 1. Pengertian Remaja..... | 44 |
| 2. Ciri-Ciri Remaja | 45 |
| 3. Batasan Usia Remaja | 46 |
| E. Tinjauan Tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung (BNNP Lampung)..... | 47 |
| 1. Badan Narkotika Nasional (BNN)..... | 47 |
| 2. Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung (BNNP Lampung)..... | 47 |
| F. Tinjauan Narkotika | 48 |
| G. Peneliti Terdahulu | 49 |
| H. Kerangka Fikir | 53 |

| | |
|---|----|
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Pendekatan dan Tipe Penelitian | 54 |
| B. Fokus Penelitian | 54 |
| C. Lokasi Penelitian | 55 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 56 |
| E. Teknik Analisis Data | 59 |
| F. Teknik Keabsahan Data | 61 |

| | |
|--|----|
| BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | |
| A. Gambaran Umum Provinsi Lampung | 64 |
| 1. Sejarah Provinsi Lampung | 64 |
| 2. Visi dan Misi Provinsi Lampung | 65 |
| B. Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung (BNNP Lampung) | 68 |
| 1. Sejarah Badan Narkotika Provinsi Lampung (BNNP Lampung) | 68 |
| 2. Visi Misi Badan Narkotika Provinsi Lampung (BNNP Lampung) | 70 |
| 3. Tugas dan Fungsi Pokok Badan Narkotika Provinsi Lampung | 71 |

| | |
|---|-----|
| BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Hasil | 76 |
| 1. Pelaksanaan Strategi BNNP Lampung Dalam Menghadapi Lampung Zona Merah Narkoba (Studi Pada Kalangan Remaja) | 76 |
| 2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Strategi BNNP Lampung Dalam Menghadapi Lampung Zona Merah Narkoba (Studi Pada Kalangan Remaja) | 104 |
| B. Pembahasan | 107 |
| 1. Pelaksanaan Strategi BNNP Lampung Dalam Menghadapi Lampung Zona Merah Narkoba (Studi Pada Kalangan Remaja) | 107 |
| 2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Strategi BNNP Lampung Dalam Menghadapi Lampung Zona Merah Narkoba (Studi Pada Kalangan Remaja) | 121 |

| | |
|---|-----|
| BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan | 123 |
| 1. Pelaksanaan Strategi BNNP Lampung Dalam Menghadapi Lampung Zona Merah Narkoba (Studi Pada Kalangan Remaja) | 123 |
| 2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Strategi BNNP Lampung Dalam Menghadapi Lampung Zona Merah Narkoba (Studi Pada Kalangan Remaja) | 124 |
| B. Saran | 124 |

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 1. Pravelensi Penyalahgunaan Narkoba | 2 |
| Tabel 2. Jumlah Pengguna Narkoba Di Provinsi Lampung | 3 |
| Tabel 3. Jumlah Pengguna Berdasarkan Usia | 4 |
| Tabel 4. Kegiatan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung 2015 | 7 |
| Tabel 5. Perbedaan dan Persamaan Dengan Peneliti Terdahulu | 52 |
| Tabel 6. Data Informan..... | 57 |
| Tabel 7. Pembagian Wilayah Provinsi Lampung..... | 66 |
| Tabel 8. Jumlah Penduduk Usia Remaja 2015..... | 67 |
| Tabel 9. Program Untuk Remaja Dalam Menghadapi Lampung Zona Merah Narkoba | 79 |
| Tabel 10. Data Test Urine 2016 | 82 |
| Tabel 11. Data Pasien Rehabilitas BNNP Lampung Tahun 2015 Berdasarkan Umur | 83 |
| Tabel 12. Landasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Dalam Menjalankan Program | 92 |
| Tabel 13. Data Pengguna Narkoba Berdasarkan Usia | 95 |
| Tabel 14. Laporan Anggaran BNNP Lampung untuk Program Remaja | 99 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|---|---------|
| 1. Model Manajemen Strategi Fred R David..... | 26 |
| 2. Model Manajemen Wheelen-Hunger..... | 30 |
| 3. Program Sosialisasi BNNP Lampung..... | 80 |
| 4. Program Test Urin BNNP Lampung..... | 81 |
| 5. Program Pembentukan Satgas Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan | 83 |
| 6. Kegiatan Sosialisasi Pemasangan Spanduk oleh BNNP Lampung..... | 84 |
| 7. Kegiatan Aksi Kampanye BNNP Lampung 2016 | 84 |
| 8. Sosialisasi di SMP 9 Bandar Lampung..... | 87 |
| 9. Sosialisasi Melalui Kegiatan Risma..... | 89 |
| 10. Workshop Pemberdayaan Alternatif..... | 90 |
| 11. Pembentukan Kader Anti Narkoba Bersama Gerindra..... | 94 |

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah dinyatakan sebagai Indonesia darurat narkoba. Hal ini membutuhkan kewaspadaan seluruh elemen bangsa baik pemerintah maupun masyarakat untuk siap siaga menghadapi kemungkinan terburuk masalah dari narkoba. Indonesia darurat narkoba ini berdasarkan pada semakin tingginya angka penyalahgunaan narkoba dari tahun 2004 hingga 2015. Pengguna-pengguna baru narkoba di Indonesia terus meningkat akan tetapi belum seimbang dengan pelayanan rehabilitasi yang memadai. Perkembangan atau pertumbuhan peredaran narkoba di Indonesia yang begitu cepat disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi dan transportasi sehingga upaya mencegah masuknya barang berbahaya terlarang itu menjadi tantangan terberat bagi aparat penegak hukum juga.

Tingginya jumlah konsumen dan disparitas harga yang tinggi menjadi rangsangan besar bagi para pebisnis narkoba untuk memasarkan produk haram tersebut di Indonesia. Berdasarkan survey Badan Narkotika Nasional (BNN), angka kematian yang disebabkan dari penyalahgunaan narkoba ini sebesar 12.044 per tahun meninggal bentuk penyalahgunaan ini disebabkan oleh pemakaian narkoba yang berlebihan, mengkonsumsi lebih dari satu jenis. Pengguna narkoba di Indonesia tercatat sebesar 4 juta jiwa (91,3% Pria dan 8,7% Wanita). Selama tahun 2014

tercatat 1,6 juta jiwa mencoba untuk memakai narkoba, 1,4 juta jiwa dan 67 ribu positif sebagai pecandu. Hal yang paling miris adalah 75% peredaran narkoba ini dikendalikan di lapas dimana pihak kepolisian tidak jarang melakukan hal yang sama. Semakin tingginya angka penyalahgunaan narkoba ini juga disebabkan sistem pengawasan terhadap jalur peredaran narkotika tidak optimal yang biasanya dilakukan melalui jalur darat, udara maupun laut. (*sumber: www.bnnplampung.com di akses pada 28 September 2015*)

Penyalahgunaan narkoba serta peredarannya yang telah mencapai seluruh penjuru daerah dan tidak lagi mengenal strata sosial masyarakat. Penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja akan tetapi penyalahgunaan narkoba telah menyebar disemua kalangan bahkan sampai kalangan pendidikan. Selain itu pengawasan pemerintah yang lemah terhadap pengedaran narkoba membuat pengedar narkoba semakin mudah menjalin transaksinya.

Tabel 1. Pravelensi Penyalahguna Narkoba

| No. | Provinsi | Jumlah | % | Populasi 10-59 |
|-----|------------------|---------|------|----------------|
| 1. | Sumatera Utara | 300.134 | 3,06 | 9.808.600 |
| 2. | Sumatera Selatan | 98.329 | 1,69 | 5.828.800 |
| 3. | Riau | 90.453 | 1,99 | 4.552.500 |
| 4. | Lampung | 89.046 | 1,52 | 5.853.100 |
| 5. | Aceh | 73.201 | 2,32 | 3.525.900 |
| 6. | Sumatera Barat | 65.208 | 1,80 | 3.622.500 |
| 7. | Jambi | 47.064 | 1,89 | 2.491.900 |
| 8. | Bengkulu | 25.784 | 1,88 | 1.370.000 |

(*sumber: Laporan Badan Narkotika Nasional, 2015*)

Berdasarkan hasil survey BNN Republik Indonesia diperoleh data narkoba di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Provinsi Lampung menempati urutan ke 10 tingkat nasional dan urutan ke 4 pada tingkat se-Sumatera. Hal ini membuat Provinsi Lampung masuk ke dalam “*zona merah*” peredaran narkoba. Provinsi Lampung dijadikan sebagai jalur transit dalam peredaran narkoba dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa begitu juga sebaliknya. Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung (BNNP Lampung) menyatakan bahwa provinsi ini menjadi gudang (*safe house*) narkoba dari Pulau Jawa untuk dipasarkan ke wilayah Sumatera, hal ini dikarenakan Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang utama Pulau Sumatera.

Tabel 2. Jumlah Penyalahguna Narkoba di Provinsi Lampung

| Tahun | Jumlah |
|--------------|---------------|
| Tahun 2008 | 115. 252 jiwa |
| Tahun 2011 | 55. 606 jiwa |
| Tahun 2014 | 89. 046 jiwa |

Sumber: Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung, 2015

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung penyalahgunaan narkoba meningkat setiap tahunnya. Jumlah penyalahguna narkoba di Lampung pada tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan 2011. Pada tahun 2014 estimasi jumlah pengguna narkoba sebanyak 89.046 jiwa, sementara pada tahun 2011 estimasi jumlah pengguna narkoba sebanyak 55.606 jiwa.

Tabel 3. Jumlah Penyalahguna Narkoba Berdasarkan Usia

| Usia | Jumlah |
|-------------|---------------|
| 10-21 tahun | 43. 700 jiwa |
| 22-29 tahun | 31. 400 jiwa |
| 30-39 tahun | 10. 600 jiwa |
| >40 tahun | 4. 100 jiwa |

Sumber: Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung, 2015

Jumlah pengguna narkoba termasuk kedalam golongan usia produktif antar 10 tahun - >40 tahun. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penyalahguna narkoba saat ini sangat banyak dan setiap tahunnya mengalami peningkatan terlebih pada usia remaja. Masa remaja adalah masa transisi dimana pada masa tersebut sering terjadi ketidakstabilan emosi maupun kejiwaan. Pada masa transisi juga remaja sedang mencari jati diri, remaja cenderung salah dalam pergaulan sehingga banyak melakukan hal-hal yang menyimpang seperti terjerat narkoba. Hal tersebut juga membuktikan bahwa masih banyak remaja yang kurang wawasannya mengenai narkoba serta dampak yang diterima dari pengguna narkob. Penyalahgunaan narkoba yang didominasi oleh usia remaja ini disebabkan oleh faktor pergaulan, perkembangan teknologi, pengaruh budaya serta gaya hidup. Selain itu minimnya peran orang tua terhadap keberlangsungan hidup para remaja juga menjadi faktor pendorong remaja tersebut melakukan tindakan menyimpang. Remaja yang seharusnya menjadi kader-kader penerus bangsa kini tidak bisa lagi menjadi jaminan untuk kemajuan bangsa dan negara. Besarnya proporsi penyalahgunaan narkoba pada usia produktif ini perlu mendapat perhatian lebih serta upaya khususnya dalam hal pencegahan narkoba yang tidak hanya pemerintah saja namun harus juga dilakukan oleh masyarakat. Selain itu

diperlukan adanya tindakan preventif baik dari keluarga, sekolah maupun lingkungan dan adanya tindakan hukum serta rehabilitasi.

Berdasarkan data tersebut diperlukannya upaya-upaya yang strategis dalam penanganan kasus narkoba ini bukan dari aparat penegak hukum saja melainkan dari pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung disetiap bidang yakni bidang pemberantasan, bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, bidang rehabilitas serta partisipasi dari seluruh elemen masyarakat Lampung sendiri untuk bersama-sama melakukan tindakan pencegahan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba, sehingga angka pertambahan penyalahgunaan narkoba dapat ditekan. Tentunya hal ini tidak dapat dibiarkan terus berlangsung. Semakin berkembangnya narkoba tidak hanya secara langsung dapat merusak kesehatan fisik dan mental para penggunanya, tetapi dampaknya dapat mengancam perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial. Akibat dari semakin banyak dan bervariasinya penyalahgunaan narkoba, maka hilangnya generasi penerus yang seharusnya dapat melanjutkan pembangunan secara berkelanjutan menjadi sebuah kekhawatiran yang beralasan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu badan koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional

(BNN) merupakan sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP danBNKab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

BNN juga bertugas untuk mengkoordinasi instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan pelaksanaannya dibidang kesediannya, pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan pengedaran narkoba. Oleh karena itu di Provinsi Lampung dibentuk sebuah Badan Narkotika Provinsi berdasarkan peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagian dari Perangkat pada Pemerintah Provinsi Lampung. Keberadaan BNNP Lampung diharapkan menjadi Badan Narkotika yang mampu menanggulangi dan dapat menjadi wadah berbagai masalah narkoba yang lebih fokus untuk diperhatikan.

Tabel 4. Kegiatan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung 2015

| Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat | Bidang Rehabilitasi | Bidang Pemberantasan | Bagian Umum |
|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba; • <i>Test urine</i>; • <i>Forum Group Discussion</i>; • Kampanye anti narkoba; • Pagelaran seni budaya. | <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan tindakan <i>assesment</i> bagi para pecandu baik melaporkan diri atau hasil tangkapan pihak berwajib; • Melakukan rehabilitasi bagi pecandu baik rawat jalan atau rawat inap; • Menjalankan kerjasama dengan beberapa lembaga rehabilitasi baik swasta maupun pemerintah; • Menjalankan program pasca rehabilitasi. | <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan tindakan penyidikan berdasarkan laporan masyarakat; • Melakukan penangkapan tersangka; • Melakukan razia di tempat-tempat hiburan atau lokasi yang dianggap sebagai tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. | <ul style="list-style-type: none"> • Subag administrasi umum • Subag perencanaan • Subag Sarana Prasarana |

Sumber : Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung 2015

Adapun strategi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung melalui kegiatan-kegiatan dibidangnya masing-masing yakni bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, bidang rehabilitasi serta bidang pemberantasan. Bidang pencegahan dan pemberdayaan telah melakukan kegiatan sosialisasi, *test urine*, *forum group discussion*, kampanye anti narkoba dan pagelaran seni budaya. Namun pada kenyataannya kegiatan ini belum mampu membantu BNNP Lampung dalam menangani permasalahan narkoba yang semakin banyak terjadi di Lampung. Bidang rehabilitasi telah melakukan kegiatan *assesment* bagi para pecandu, melakukan rehabilitasi, menjalankan kerjasama dengan beberapa lembaga rehabilitasi dan menjalankan program pasca rehabilitasi.

Akan tetapi pada nyatanya Lampung masih kekurangan tempat rehabilitasi mengingat banyaknya jumlah pengguna narkoba yang ada di Lampung. Bidang pemberantasan melakukan kegiatan tindakan penyidikan, melakukan penangkapan dan melakukan razia. Namun razia yang dilakukan belum merata karena hanya dilakukan di tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat peredaran narkoba. Pada kenyataannya transaksi narkoba kerap terjadi ditempat yang tidak terduga seperti di Lapas yang sering terjadi transaksi narkoba antara terpidana dengan sipir penjara.

Berdasarkan fakta dilapangan, jelas terlihat bahwa strategi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung belum memperlihatkan upaya dan hasil yang optimal. Hal ini terlihat pada meningkatnya jumlah pengguna narkoba setiap tahun yang didominasi oleh usia produktif dan kurangnya tempat rehabilitasi bagi para pecandu. Maka dari itu diperlukan strategi yang lebih baik lagi bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung dalam menghadapi Lampung Zona Merah Narkoba.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam menghadapi Lampung Zona Merah Narkoba untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba khususnya di Provinsi Lampung. Penelitian ini berjudul **“Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Dalam Menghadapi Lampung Zona Merah Narkoba (Studi Pada Kalangan Remaja)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung dalam menghadapi Lampung Zona Merah Narkoba khususnya pada kalangan remaja di Provinsi Lampung serta pengaruh strategi tersebut terhadap angka pecandu narkoba?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan strategi yang dilakukan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian untuk :

1. Menganalisa strategi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam menghadapi Lampung Zona Merah Narkoba khususnya kalangan remaja di Provinsi Lampung dan mengetahui tingkat penurunan angka pecandu narkoba melalui strategi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.
2. Teridentifikasinya hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam mengimplementasikan strategi yang dilakukan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi dan pengetahuan dalam perkembangan ilmu administrasi negara khususnya yang berkaitan dengan strategi organisasi publik.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan bagi para stakeholder, khususnya bagi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Strategi

1. Pengertian Strategi

Menurut Bracker dalam Heene (2010:53), ditinjau secara etimologi “strategi” bersumber dari kata Yunani Klasik, yakni “*stratego*” (jenderal), yang pada dasarnya diambil dari pilihan kata-kata Yunani untuk “pasukan” dan “memimpin”. Penggunaan kata kerja Yunani yang berhubungan dengan “*stratego*” ini dapat diartikan sebagai perencanaan dan pemusnahan musuh-musuh dengan menggunakan cara yang efektif berlandaskan sarana-sarana yang dimiliki.

Strategi menurut Nawawi (2012:147), dari sudut etimologis berarti penggunaan kata “strategik” dalam manajemen sebuah organisasi dapat diartikan sebagai kiat, cara dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang terarah ada tujuan strategik organisasi. Sedangkan menurut Chandler dalam Umar (2010:16) mengemukakan bahwa strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. Dengan kata lain, strategi adalah pilihan dan rute yang tidak hanya sekedar mencapai suatu tujuan akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di dalam lingkungan hidup dimana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya.

Menurut Akdon (2011:12) pada dasarnya yang dimaksud strategik bagi suatu manajemen organisasi adalah rencana berskala besar yang berorientasi pada jangka panjang yang jauh ke masa depan serta menetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan yang kesemuanya secara efektif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan yang kesemuanya diarahkan ada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang bersangkutan. Berdasarkan tinjauan tersebut, maka strategi organisasi dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Alat bagi organisasi untuk mencaai tujuan-tujuannya;
- b. Seperangkat perencanaan yang dirumuskan oleh organisasi sebagai hasil pengkajian yang mendalam terhadap kondisi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal;
- c. Pola arus dinamis yang diterapkan sejalan dengan keputusan dan tindakan yang dipilih organisasi.

Pearce dan Robinson dalam Amirullah (2015:12) menyatakan strategi adalah rencana manajer yang berskala besar dan berorientasi kepada masa depan untuk berinteraksi dengan lingkungan persaingan guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Mintzberg dalam Heene (2010:54) mengemukakan bahwa konsep “strategi” itu sekurang-kurangnya mencakup lima arti yang saling terkait, dimana strategi adalah suatu:

- a. Perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi secara tradisional mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjangnya;

- b. Acuan yang berkenaan dengan penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi;
- c. Sudut pemosisian yang dipilih organisasi saat memunculkan aktivitasnya;
- d. Suatu prepektif yang menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi dengan lingkungannya, yang menjadi tapal batas bagi aktivitasnya;
- e. Rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengelabui para pesaing atau oposan.

Pemahaman lain diberikan oleh Gluech dan Jauch (1994:9), menurutnya strategi adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir. Oleh karena itu, strategi harus mencakup beberapa hal, diantaranya;

- a. Menyatu, yaitu mengikat semua bagian dalam organisasi menjadi satu;
- b. Luas atau menyeluruh, yaitu mencakup semua aspek dalam organisasi;
- c. Terpadu, yaitu semua bagian dari strategi itu serasi satu sama lainnya dan bersesuaian dengan seluruh level organisasi.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan strategi adalah rencana yang dirumuskan secara sistematis oleh sebuah organisasi baik organisasi publik maupun organisasi swasta dan dijadikan sebagai langkah-langkah yang terarah dan berorientasi pada jangka panjang dalam pencapaian tujuan organisasi. Strategi membentuk sebuah pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi organisasi. Keputusan-keputusan yang diambil organisasi tersebut nantinya dijadikan pedoman dalam mewujudkan kemajuan organisasi dengan strategi yang dilakukan.

2. Jenis-Jenis Strategi

Wechsler dan Backoff dalam Heene (2010:62), menekankan bahwa terbuka peluang untuk mengidentifikasi dalil-dalil yang memungkinkan kategorisasi penerapan strategi organisasi publik ke dalam empat corak persilangan. Mengenai ciri-ciri spesifik dari keempat jenis strategi publik yang telah teridentifikasi oleh Wechsler dan Backoff dalam Heene (2010:63), dapat diilustrasikan seperti berikut:

a. Strategi ekspansi

Di dalam strategi ekspansi penerapan strategi terutama sekali ditujukan bagi peningkatan status, kapasitas serta sarana-sarana yang berdampak mampu memberi sentuhan warna masa depan keorganisasian yang selaras zaman.

b. Strategi transformasi

Pada strategi ini ditandai oleh adanya kebutuhan dari organisasi untuk memenuhi tekanan internal ataupun eksternal, yang ada pada prinsipnya dilakukan demi terjadinya perubahan fundamental. Oleh karenanya, penerapan strategi pada organisasi cenderung lebih banyak dipengaruhi oleh strategi yang mendompleng belakangan dari pihak eksternal dibandingkan dengan aspirasinya sendiri.

c. Strategi isolasi

Strategi isolasi yang memiliki ciri adanya penolakan aktif terhadap tekanan eksternal yang tengah dihadapi oleh organisasi. Strategi ini berupaya untuk mengakomodasi tekanan eksternal dengan aspirasi-aspirasinya sendiri, dengan catatan keinginan untuk tetap bisa mandiri secara organisatoris akan senantiasa diprioritaskan.

d. Strategi politisasi

Dalam strategi politisasi mengenal dua perwujudan. Pada perwujudan yang pertama, strategi organisasi ditujukan untuk menciptakan terbentuknya keseimbangan kekuatan yang baru di dalam suatu lingkungan politik terhadap strategi yang dimunculkan dari organisasi tersebut. Sedangkan perwujudan yang kedua ini paling negatif, organisasi publik tak lain hanya merupakan suatu instrumen partai politik. Prioritas strateginya disesuaikan dengan prioritas tujuan partai politik dan kemudian berikutnya barulah bagi tujuan kepentingan publik.

Miles dan Snow dalam Amirullah (2015:179) mengklasifikasikan organisasi berdasarkan tingkat sejauh mana mereka mengubah produk atau pasarnya ke dalam salah satu dari empat jenis strategi: *defender*, *prospector*, *analyzer* dan *reactor*.

a. Strategi *defender*

Pada strategi ini perusahaan mencari stabilitas dengan memproduksi hanya sejumlah produk terbatas yang ditujukan pada suatu segmen dari seluruh pasar yang potensial. Strategi ini bertujuan untuk melokalisir dan memelihara cara yang aman dalam bidang produk yang relatif stabil.

b. Strategi *prospector*

Strategi *prospector* merupakan strategi organisasi kebalikannya dari *defender*. Kekuatan strategi ini adalah menemukan dan mengeksploitasi produk baru dan peluang pasar. Pada jenis strategi *prospector* ini perusahaan memiliki lini produk luas dan berfokus pada inovasi produk dan peluang-peluang pasar.

c. Strategi *analyzers*

Jenis strategi ini cenderung mempunyai keuntungan lebih kecil dari produk dan jasa yang dijual dibandingkan dengan prospectors, akan tetapi lebih efisien, *analyzers* mencari fleksibilitas maupun stabilitas.

d. Strategi *reactors*

Pada umumnya reactor memberi tanggapan secara tidak benar, berprestasi buruk dan mengakibatkan mereka segan mengikatkan diri secara agresif pada strategi tertentu untuk masa datang. Organisasi tidak mempunyai sejumlah mekanisme tanggapan yang dapat digunakannya untuk menghadapi perubahan lingkungan, reactor merupakan strategi sisa karena ketidak konsistenan dan tidak stabil yang timbul jika salah satu dari ketiga strategi lainnya dikejar secara tidak benar.

Menurut Kooten dalam Salusu (2006:104-105), jenis-jenis strategi meliputi *corporate strategy* (strategi organisasi), *program strategy* (strategi program), *resources support strategy* (strategi pendukung sumber daya) serta *institutional strategy* (strategi kelembagaan).

a. *Corporate strategy* (strategi organisasi)

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif strategi baru. Pembatasan ini diperlukan untuk mengetahui apa yang dilakukan dan untuk siapa.

b. *Program strategy* (strategi program)

Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu kira-kira apa dampaknya apabila suatu program

tertentu dilancarkan atau diperkenalkan (apa dampaknya bagi sasaran organisasi).

c. *Resources support strategy* (strategi pendukung sumber daya)

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan dan sebagainya.

d. *Institutional strategy* (strategi kelembagaan)

Fokus dari strategi kelembagaan adalah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

Dari beberapa jenis strategi diatas, yang berkaitan dengan penelitian ini adalah tipe *program strategy* (strategi program), dimana fokus dari jenis strategi ini adalah berkaitan dengan hasil yang dicapai dari suatu strategi baru yang akan dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam menghadapi situasi Lampung Zona Merah Narkoba terhadp angka pecandu narkoba.

3. Fungsi Strategi

Menurut Sofjan (2013:7) fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Terdapat enam fungsi yang harus dilakukan secara imultan, yaitu:

- a. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain;
- b. Menghubungkan atau mengkaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya;

- c. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru;
- d. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang;
- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi kedepan;
- f. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu.

B. Tinjauan Tentang Manajemen Strategik

1. Pengertian Manajemen Strategik

Menurut Nawawi (2012:148), manajemen strategik adalah proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keutusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai cara melaksanakannya yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Dari pengertian tersebut terdapat beberapa aspek yang penting, antara lain;

- a. Manajemen strategi merupakan proses pengambilan keputusan;
- b. Keputusan yang ditetapkan mendasar dan menyeluruh yang berarti berkenaan dengan aspek-aspek yang penting dalam kehidupan sebuah organisasi, terutama tujuannya dan cara melaksanakan atau cara pencapaian;
- c. Pembuatan keputusan tersebut harus dilakukan atau sekurang-kurangnya melibatkan pimpinan puncak, sebagai penanggung jawab utama ada keberhasilan atau kegagalan organisasi;

- d. Pengimplementasian keputusan tersebut sebagai strategi organisasi untuk mencapai tujuan strategiknya;
- e. Keputusan yang ditetapkan manajemen puncak yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam bentuk kegiatan atau pelaksanaan pekerjaan yang terarah ada tujuan strategik organisasi.

Gregory dan Alex (1993:9) mengemukakan bahwa manajemen strategik dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang memungkinkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Tujuan manajemen strategik ini adalah untuk mengeksplorasi dan menciptakan peluang baru dan berbeda untuk dimasa yang akan datang, sedangkan perencanaan jangka panjang mencoba untuk mengoptimalkan keadaan sekarang. Sedangkan menurut Poister dalam Heene (2010:76), manajemen strategik mengintegrasikan semua proses manajemen lainnya dengan tujuan mengembangkan diri berdasarkan suatu pendekatan yang sistematis, rasional dan efektif dalam menentukan tujuan-tujuan objektif dari organisasi kemudian mengaktualisasikannya, memantau dan mengevaluasinya.

Menurut Siagian (2007:15), manajemen strategik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Wheelen and Hunger dalam Umar (2010:16) menyatakan bahwa manajemen strategik adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategik meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan

strategi atau perencanaan jangka panjang), evaluasi dan pengendalian. Manajemen strategi menekankan dan mengutamakan pengamatan dan evaluasi mengenai peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) lingkungan eksternal perusahaan dengan melihat kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) dalam lingkungan eksternal organisasi.

Bozmen & Straussman dalam Akdon (2011:87) mengemukakan empat prinsip penerapan manajemen strategik pada sektor publik, yaitu :

- a. Perhatian pada jangka panjang;
- b. Pengintegrasian tujuan dan sasaran dalam hierarki yang jelas;
- c. Kesadaran bahwa manajemen strategik membutuhkan kedisiplinan dan komitmen untuk dapat dilaksanakan dan tidak *self-implementing*;
- d. Prespektif eksternal tidak diartikan sebagai adaptasi total terhadap lingkungan tapi merupakan antisipasi terhadap perubahan lingkungan.

Jauch & Gluech dalam Akdon (2011:17) mengemukakan pengertian manajemen strategik sebagai sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran organisasi. Pada hakekatnya manajemen strategik mengandung dua hal penting, yakni :

- a. Manajemen strategik terdiri dari tiga macam proses manajemen yaitu pembuatan strategi, penerapan strategi dan evaluasi atau kontrol terhadap strategi.

- b. Manajemen strategik memfokuskan pada penyatuan atau penggabungan aspek-aspek pemasaran, riset dan pengembangan, keuangan atau akuntansi dan produksi dari sebuah bisnis.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi adalah suatu rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen puncak untuk seluruh anggotanya sehingga dalam pelaksanaan pencapaian tujuan sebuah organisasi dilakukan dengan terarah. Manajemen strategi membentuk sebuah pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi organisasi. Keputusan-keputusan yang diambil organisasi tersebut nantinya dijadikan pedoman dalam mewujudkan kemajuan organisasi dengan strategi yang dilakukan.

2. Karakteristik Manajemen Strategik

Karakteristik dalam manajemen strategi menurut Nawawi (2012:150) yakni;

- a. Manajemen strategi diwujudkan dalam bentuk perencanaan berskala besar dalam arti mencakup seluruh komponen dilingkungan sebuah organisasi yang dituangkan dalam bentuk rencana strategi (renstra) yang dijabarkan menjadi rencana oprasional (renop), yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program;
- b. Rencana strategi berorientasi pada jangkauan masa depan;
- c. Visi dan misi merupakan pemilihan strategi yang menghasilkan strategi induk dan tujuan organisasi untuk jangka panjang merupakan acuan dalam merumuskan rencana strategik;

- d. Rencana operasional (renop) yang berisi program-program dan proyek dengan jangkauan sasaran jangka sedang sebagai keputusan manajemen puncak;
- e. Penetapan rencana strategik dan rencana operasional harus melibatkan manajemen puncak;
- f. Pengimplementasian strategi dalam program termasuk proyek untuk mencapai sasarnya masing-masing melalui fungsi manajemen.

3. Dimensi-Dimensi Manajemen Strategik

Berdasarkan pengertian dan karakteristik dapat disimpulkan bahwa manajemen strategik memiliki beberapa dimensi atau bersifat multidimensional. Nawawi (2012:153) menyatakan dimensi-dimensi manajemen strategik yakni;

- a. Dimensi Waktu dan Orientasi Masa Depan

Manajemen strategik dalam mempertahankan dan mengembangkan eksistensi suatu organisasi berpandangan jauh ke masa depan dan berperilaku proaktif dan antisipatif terhadap kondisi masa depan yang diprediksi akan dihadapi.

- b. Dimensi Internal dan Eksternal

Dimensi internal adalah kondisi organisasi non profit pada saat sekarang, berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang harus diketahui secara tepat untuk merumuskan rencana strategik yang berjangka panjang.

Dimensi eksternal pada dasarnya merupakan analisis terhadap lingkungan sekitar organisasi non profit.

c. Dimensi Pendayagunaan Sumber-Sumber

Manajemen strategi sebagai kegiatan manajemen tidak dapat melepaskan diri dari kemampuan mendayagunakan berbagai sumber daya yang dimiliki. Sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya material yang berupa sarana dan prasarana, sumber daya finansial yang berupa alokasi dana serta sumber daya manusia dan sumber daya teknologi.

d. Dimensi Keikutsertaan Manajemen Puncak

Keikutsertaan pimpinan puncak dalam merumuskan rencana strategik dan rencana operasional sangat penting karena realisasinya sangat tergantung pada kewenangan dan tanggung jawabnya, baik di dalam maupun ke luar organisasi termasuk dalam hubungan internasional. Untuk itu manajemen puncak sesuai kewenangan dan tanggung jawab harus mampu memprediksi bahwa rencana strategik dan rencana operasional dapat dilaksanakan.

e. Dimensi Multi Bidang

Manajemen strategik sebagai sistem pengimplementasiannya harus didasari dengan menempatkan organisasi sebagai satu sistem. Dengan demikian sebuah organisasi akan dapat menyusun rencana strategik dan rencana operasional jika tidak memiliki keterikatan atau ketergantungan sebagai bawahan pada organisasi lain sebagai atasan.

4. Manfaat Manajemen Strategik

Manajemen strategik memungkinkan sebuah organisasi untuk lebih produktif alih-alih reaktif dalam membangun masa depan dan memungkinkan suatu organisasi untuk mengarahkan dan mempengaruhi berbagai aktivitas. Secara historis, menurut David (2012:23) manfaat utama dari manajemen strategis untuk

membantu organisasi merumuskan strategi-strategi yang lebih baik melalui penggunaan pendekatan terhadap pilihan strategi yang lebih sistematis, logis dan rasional. Manajemen strategik dapat mengurangi ketidakpastian dan kekomplekan dalam menyusun perencanaan sebagai fungsi manajemen dan dalam proses pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan semua sumber daya yang secara nyata dimiliki melalui proses yang terintegrasi dengan fungsi manajemen lain dan dapat di nilai hasilnya berdasarkan tujuan organisasi.

Dengan menggunakan manajemen strategik sebagai kerangka kerja organisasi dalam mencapai dan mewujudkan tujuan, maka mendorong setiap manajer untuk dapat lebih berpikir lebih kreatif dan strategik. Akdon (2011:277) menyatakan manfaat yang diperoleh organisasi dalam penerapan manajemen strategik yakni :

- a. Memberikan arah dalam mencapai tujuan jangka panjang;
- b. Membantu organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi;
- c. Menjadikan organisasi lebih efektif;
- d. Keunggulan komparatif dalam lingkungan yang semakin kompleks dapat diidentifikasi;
- e. Dapat mengantisipasi masalah yang akan muncul di masa mendatang;
- f. Meningkatkan motivasi pegawai;
- g. Kegiatan yang duplikasi akan dapat dihindarkan;
- h. Keengganan pegawai lama untuk melakukan perubahan dapat dikurangi.

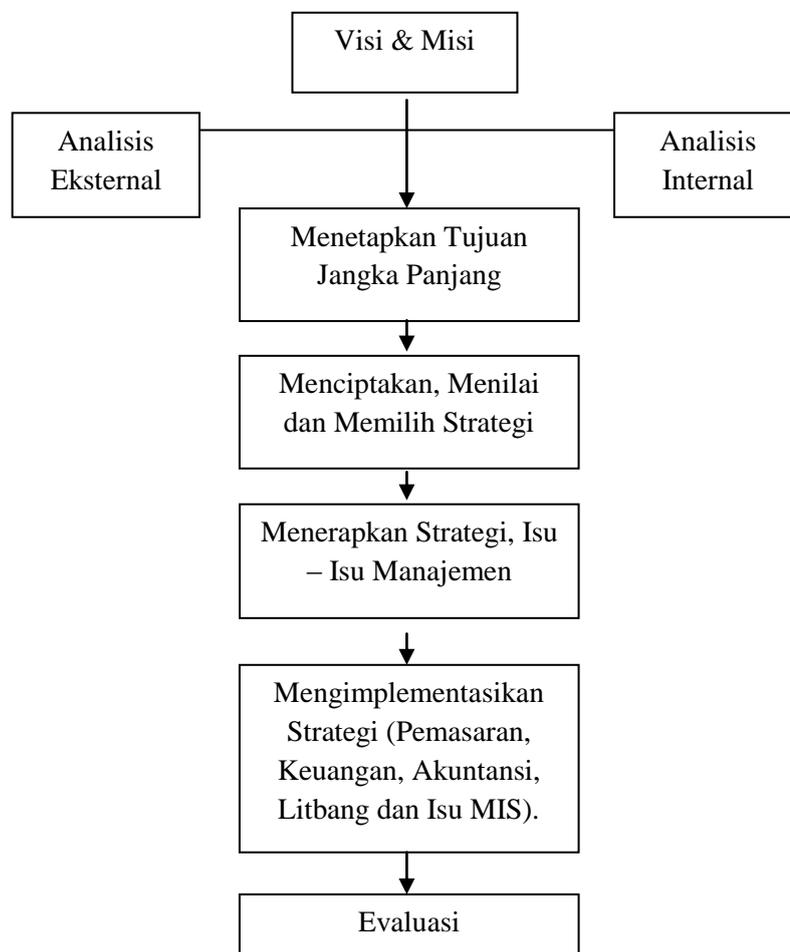
5. Tahap-Tahap Proses Manajemen Strategik

Dalam merumuskan dan menetapkan suatu strategi, berbagai tahap harus dilalui. Siagian (2007:30) mengungkapkan dua belas tahapan dalam proses manajemen strategik yakni;

- a. Perumusan misi organisasi;
- b. Penentuan profil organisasi;
- c. Analisis dan pilihan strategik;
- d. Penetapan sasaran jangka panjang;
- e. Penentuan strategi induk;
- f. Penentuan strategi operasional;
- g. Penentuan sasaran jangka pendek;
- h. Perumusan kebijaksanaan;
- i. Pelembagaan strategi;
- j. Penciptaan sistem pengawasan;
- k. Penciptaan sistem penilaian;
- l. Penciptaan sistem umpan balik.

6. Model Manajemen Strategik

Gambar 1. Model Manajemen Strategik Fred R. David



David (2012:21) model manajemen strategi komprehensif terbagi kedalam tiga tahap yakni perumusan strategi (visi dan misi, audit *eksternal*, audit *internal*, menetapkan tujuan jangka panjang serta menciptakan, mengevaluasi dan memilih strategi), penerapan strategi (mengimplementasikan strategi- isu manajemen dan mengimplementasikan strategi- pemasaran, keuangan/akuntansi, litbang dan SIM) dan penilaian strategi (evaluasi).

a. Visi dan Misi

Pernyataan visi yang jelas menjadi dasar bagi pengembangan pernyataan visi yang komprehensif. Pernyataan misi adalah sebuah deklarasi tentang alasan keberadaan suatu organisasi. Suatu organisasi mencapai kesadaran akan maksud yang lebih baik mana kala para penyusun strategi, manajer dan karyawan mampu mengembangkan serta mengkomunikasikan visi dan misi yang jelas.

b. Audit Eksternal

Tujuan audit eksternal adalah untuk mengembangkan sebuah daftar terbatas dari peluang yang dapat menguntungkan sebuah perusahaan dan ancaman yang harus dihindari. Kekuatan eksternal dapat dibagi menjadi lima kategori: (1) kekuatan ekonomi; (2) kekuatan sosial, budaya, demografis dan lingkungan; (3) kekuatan politik, pemerintahan dan hukum; (4) kekuatan teknologi; (5) kekuatan kompetitif.

c. Audit Internal

Proses pelaksanaan audit internal merepresentasikan sebuah peluang bagi para manajer dan karyawan dari segala tingkat di organisasi untuk berpartisipasi dalam menentukan masa depan perusahaan.

d. Menetapkan Tujuan Jangka Panjang

Tujuan jangka panjang merepresentasikan hasil-hasil yang diharapkan dari pelaksanaan strategi. Tujuan harus kuantitatif, dapat diukur, realistis, dapat dimengerti, menantang, hierarkis, mungkin untuk dicapai dan kongruen antarunit organisasional.

e. Menciptakan, Menilai dan Memilih Strategi

Analisis dan pemilihan strategi berusaha menentukan tindakan alternatif yang paling baik dalam membantu perusahaan mencapai misi dan tujuannya. Mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi alternatif hendaknya melibatkan banyak manajer dan karyawan yang sebelumnya merumuskan pernyataan visi dan misi organisasi, melakukan audit eksternal dan internal.

f. Menerapkan Strategi, Isu – Isu Manajemen

Perumusan strategi yang berhasil tidak menjamin penerapan strategi juga berhasil. Para manajer divisional dan fungsional dilibatkan sejauh mungkin dalam aktivitas perumusan strategi.

g. Mengimplementasikan Strategi (Pemasaran, Keuangan/Akuntansi, Litbang dan SIM)

1) Pemasaran

Segmentasi pasar merupakan sebuah variabel penting dalam penerapan strategi untuk tiga alasan. Pertama, strategi pengembangan pasar, pengembangan produk, penetrasi pasar. Kedua, segmentasi pasar memungkinkan sebuah perusahaan untuk beroperasi dengan sumber daya yang terbatas. Ketiga, keputusan segmentasi pasar secara langsung mempengaruhi variabel pemasaran.

2) Keuangan/Akuntansi

Analisis perhitungan keuangan adalah sebuah teknik penerapan strategi yang pokok sebab analisis tersebut memungkinkan sebuah organisasi untuk mengamati hasil yang diharapkan dari berbagai tindakan dan

pendekatan. Anggaran keuangan adalah dokumen yang merinci bagaimana dana akan diperoleh dan dihabiskan untuk kurun waktu tertentu.

3) Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Personel litbang dapat memainkan peran yang integral dalam penerapan strategi. Para individu secara umum bertanggung jawab untuk mengembangkan berbagai produk baru dan memperbaiki produk lama.

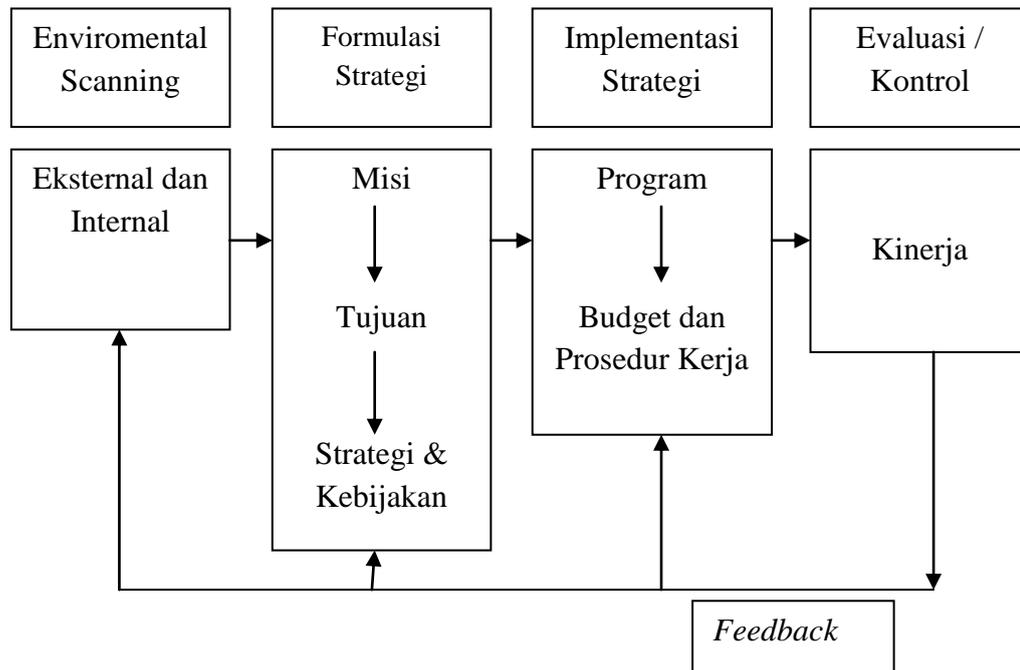
4) Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Informasi adalah landasan pemahaman di sebuah perusahaan. Proses manajemen strategis sangat terbantu apabila perusahaan memiliki sistem informasi manajemen yang efektif. Pengumpulan, pencarian dan penyimpanan informasi dapat digunakan untuk menciptakan keunggulan kompetitif di perusahaan.

h. Evaluasi

Evaluasi strategi terdiri dari tiga kegiatan pokok; (1) penyelidikan atas landasan yang mendasari strategi; (2) membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya; (3) pengambilan tindakan korektif.

Gambar 2. Model Manajemen Strategik Wheelen-Hunger



Model manajemen strategis menurut Wheelen-Hunger (2003:12) meliputi: a) Eksternal dan Internal; b) Misi; c) Tujuan Organisasi; d) Strategi dan Kebijakan; e) Program; f) *Budget* dan Prosedur Kerja; g) Kinerja; h) *Feedback*.

a. Eksternal dan Internal

Sebelum melakukan strategi yang akan dilakukan terlebih dahulu para manajer melakukan analisis eksternal dan internal. David (2012:17) menyatakan eksternal merupakan sebuah peluang dan ancaman yang menunjuk pada kejadian ekonomi, sosial, budaya, demografis, lingkungan hidup, politik, hukum, pemerintahan, teknologi yang secara signifikan dapat menguntungkan atau merugikan suatu organisasi di masa yang akan datang. Sedangkan internal merupakan kekuatan dan kelemahan dalam suatu organisasi

b. Misi

Suatu organisasi yang besar maupun kecil harus memiliki misi yang jelas. Amirullah (2015:16) menyatakan misi adalah suatu tujuan unik yang membedakan dari perusahaan lain yang sejenis dan mengidentifikasi cakupan operasinya. Dengan adanya misi maka perusahaan atau organisasi dapat memanfaatkan seluruh potensi yang ada untuk mencapai tujuan akhir secara efektif dan efisien.

c. Tujuan organisasi

Tujuan adalah pernyataan luas tentang apa yang akan dituju dan diwujudkan oleh organisasi terkait dengan misi dasarnya. Amirullah (2015:16) menyatakan tujuan merupakan landasan utama untuk menggariskan kebijakan yang ditempuh dan arah tindakan untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi.

d. Strategi dan Kebijakan

Akdon (2011:279) menyatakan strategi adalah pemikiran secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif mengenai berbagai langkah yang diperlukan dalam mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi. Sedangkan kebijakan menurut Morrisey dalam Akdon (2011:278) adalah ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan organisasi maupun masyarakat guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran dapat berlangsung secara lancar dan terpadu.

e. Program

Setelah perencanaan dibuat dalam bentuk yang masih global dan berjangka panjang, maka hendaknya dibuat dalam bentuk yang lebih detail dan berjangka pendek yaitu berupa proyek-proyek yang akan membentuk suatu program kerja.

f. *Budget* atau Anggaran

Budget atau anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk periode tertentu di masa yang akan datang.

g. Prosedur kerja

Prosedur kerja adalah tahap-tahap yang dilakukan dalam melaksanakan program yang telah dibuat. Menurut Terry dalam Syamsi (2004:33), prosedur kerja adalah serangkaian tugas yang saling berkaitan dan yang secara kronologis berurutan dalam rangka menyelesaikan suatu pekerjaan. Syamsi (2004:34) mengungkapkan kemungkinan prosedur yang telah berlaku lama itu pada suatu ketika akan tidak cocok lagi untuk dipertahankan. Oleh karena itu, secara berkala perlu diadakan evaluasi terhadap prosedur yang berlaku, masih sesuai atau tidak.

h. Kinerja

Amirullah (2015:166) mengungkapkan kinerja adalah hasil kerja suatu organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan strategik, kepuasan dan kontribusinya terhadap lingkungan strategik.

i. *Feedback*

Manajemen strategis merupakan proses yang terus berlangsung secara berkesinambungan. Jika suatu strategi diimplementasikan, maka pelaksanaannya harus dimonitor untuk menentukan tujuan strategis yang sedang dicapai. Informasi ini selanjutnya menjadi *feedback* strategis selanjutnya.

Berdasarkan model manajemen strategi diatas peneliti menggunakan model manajemen strategis pada tahap implementasi strategi. Alasan peneliti menggunakan model ini untuk melihat pelaksanaan strategi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam menghadapi Lampung Zona Merah Narkoba.

C. Tinjauan Tentang Implementasi Strategi

1. Pengertian Implementasi Strategi

Tahapan penting setelah perumusan strategi adalah implementasi strategi. Tahapan ini merupakan tahapan yang kritis karena banyak organisasi yang mampu menyusun perumusan strategi dengan baik namun tidak mampu mengimplementasikannya dengan baik. Implementasi sebagai suatu konsep tindak lanjut pelaksanaan kegiatan yang cukup menarik untuk dikaji oleh cabang ilmu. Hal ini semakin mendorong perkembangan konsep implementasi itu sendiri dan juga menyadari bahwa dalam mempelajari implementasi sebagai suatu konsep akan dapat memberikan kemajuan dalam upaya pencapaian tujuan.

Amirullah (2015:17) mengungkapkan implementasi strategi adalah sebuah tindakan pengelolaan bermacam-macam sumber daya organisasi dan manajemen yang mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan sumber-sumber daya perusahaan melalui strategi yang dipilih. Implementasi strategi diperlukan untuk memerinci secara lebih tepat dan jelas bagaimana sesungguhnya pilihan strategi yang telah diambil direalisasikan. Implementasi strategi yang berhasil sangat tergantung pada keahlian dan kemampuan serta keterampilan manajer.

Implentasi strategi merupakan salah satu bagian terpenting dari proses strategi dan sepatutnya memperoleh perhatian sama seperti ketika proses memformulasikannya. Dalam menjalankan proses implementasi, para manajer wajib melakukan pemantauan demi menjaga terciptanya sebuah lingkungan keorganisasian yang kondusif untuk mengoperasionalkan strategi yang telah diformulasikan. Huff dalam Heene (2010:178) mengungkapkan upaya mengkombinasikan antara kebijakan memberikan hadiah berdasarkan kepatuhan akan pelaksanaan atas keputusan-keputusan strategis yang telah dirumuskan, pengembangan teknik-teknik persuasif untuk menjamin hadirnya partisipasi dari berbagai partisipan (rekanan) selama berlangsungnya proses implementasi termasuk juga dalam meningkatkan intensitas keterlibatan.

Amir (2011:192) menyatakan implementasi strategi merupakan rangkaian aktivitas dan pekerjaan yang dibutuhkan untuk mengeksekusi perencanaan strategik. Artinya, apa yang dirumuskan pada strategi dan kebijakan akan diterapkan dalam berbagai program kerja, anggaran dan prosedur-prosedur. Rumusan strategi yang baik tidak ada artinya bila tidak diterapkan dalam

implementasi, begitu juga sebaliknya. Implementasi berkaitan dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu organisasi, lembaga atau badan tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Hubeis dan Najib (2008:25-26), implementasi strategi adalah proses penerapan setelah rencana dirumuskan. Dalam implementasi ada beberapa unsur penting yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi yaitu penetapan tujuan tahunan, perumusan kebijakan, memotivasi pekerja dan mengalokasikan sumber daya.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan implementasi strategi merupakan jumlah keseluruhan aktivitas dan proses manajemen mewujudkan strateginya dalam bentuk program, prosedur dan anggaran dimana dalam pengembangan strateginya dilakukan dalam sebuah tindakan.

2. Model Implementasi Strategi

Menurut Salusu (2006:409) implementasi strategi merupakan seperangkat kegiatan yang dilakukan berdasarkan suatu keputusan yang prosesnya terarah dan terkoordinasi serta melibatkan sumber daya. Sifat dari suatu implementasi adalah tidak dapat beroperasi tanpa adanya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya.

Berikut adalah model-model implementasi strategi;

a. Implementasi strategi menurut Fred R. David

1) Mengimplementasikan Strategi – Isu Manajemen

Perumusan strategi yang berhasil tidak menjamin penerapan strategi juga berhasil. Para manajer divisional dan fungsional dilibatkan sejauh mungkin dalam aktivitas perumusan strategi. Isu-isu utama manajemen bagi penerapan strategi meliputi penetapan tujuan tahunan, pembuatan kebijakan, alokasi sumber daya, perubahan struktur organisasi, restrukturisasi dan rekayasa ulang, perbaikan program penghargaan insentif, minimalisasi penolakan terhadap perubahan, pengenalan manajer pada strategi, pengembangan budaya yang mendukung strategi, adaptasi proses produksi, pengembangan fungsi sumber daya manusia yang efektif.

2) Mengimplementasikan Strategi – Pemasaran, Keuangan/Akuntansi, Litbang dan SIM

a) Pemasaran

Segmentasi pasar merupakan sebuah variabel penting dalam penerapan strategi untuk tiga alasan. Pertama, strategi pengembangan pasar, pengembangan produk, penetrasi pasar. Kedua, segmentasi pasar memungkinkan sebuah perusahaan untuk beroperasi dengan sumber daya yang terbatas. Ketiga, keputusan segmentasi pasar secara langsung mempengaruhi variabel pemasaran.

b) Keuangan/Akuntansi

Analisis perhitungan keuangan adalah sebuah teknik penerapan strategi yang pokok sebab analisis tersebut memungkinkan sebuah organisasi untuk mengamati hasil yang diharapkan dari berbagai tindakan dan pendekatan. Anggaran keuangan adalah dokumen yang merinci bagaimana dana akan diperoleh dan dihabiskan untuk kurun waktu tertentu.

c) Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Personel litbang dapat memainkan peran yang integral dalam penerapan strategi. Para individu secara umum bertanggung jawab untuk mengembangkan berbagai produk baru dan memperbaiki produk lama.

d) Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Informasi adalah landasan pemahaman di sebuah perusahaan. Proses manajemen strategis sangat terbantu apabila perusahaan memiliki sistem informasi manajemen yang efektif. Pengumpulan, pencarian dan penyimpanan informasi dapat digunakan untuk menciptakan keunggulan kompetitif di perusahaan.

b. Implementasi strategi menurut Wheelen-Hunger

1) Program

Setelah perencanaan dibuat dalam bentuk yang masih global dan berjangka panjang, maka dibuat dalam bentuk yang lebih detail dan berjangka pendek yaitu berupa proyek-proyek yang akan membentuk suatu program kerja. Program disusun dengan mengacu pada kebijakan

yang telah ditetapkan. Amirullah (2015:281) menyatakan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu instansi pemerintah atau lebih ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program dapat diartikan menjadi dua istilah yaitu program dalam arti khusus dan program dalam arti umum. Secara umum program merupakan sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan. Apabila program dikaitkan langsung dengan evaluasi program maka program didefinisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Dengan demikian bahwa didalam program terdapat tiga unsur penting yaitu.

- a. Program adalah realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan.
- b. Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tapi berkesinambungan.
- c. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan semua orang.

2) *Budget* atau Anggaran

Wheelen Hunger (2003:18) menyatakan *budget* atau anggaran merupakan program yang dinyatakan dalam bentuk satuan biaya. Setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya, yang dapat digunakan oleh manajemen di masa yang akan datang. Nafarin (2000:9) menyatakan

anggaran merupakan rencana keuangan periodic yang disusun berdasarkan program-program yang telah disahkan. Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka panjang tertentu. Selanjutnya, Dharmanegara (2010:2) menyatakan anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit satuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang serta merupakan hasil kerja (*output*) terutama taksiran yang akan dilaksanakan dimasa mendatang.

3) Prosedur Kerja

Amirullah (2015:199) menjelaskan prosedur kerja pada dasarnya merupakan rangkaian tata cara pelaksanaan kerja yang berurutan tahap demi tahap yang menunjukkan arus atau proses pencapaian suatu tujuan atau sasaran program. Menurut Terry dalam Syamsi (2004:33), prosedur kerja adalah serangkaian tugas yang saling berkaitan dan yang secara kronologis berurutan dalam rangka menyelesaikan suatu pekerjaan. Syamsi (2004:34) mengungkapkan kemungkinan prosedur yang telah berlaku lama itu pada suatu ketika akan tidak cocok lagi untuk dipertahankan. Oleh karena itu, secara berkala perlu diadakan evaluasi terhadap prosedur yang berlaku, masih sesuai atau tidak.

c. Implementasi program menurut Higgins

1) Perencanaan Integral dan Sistem Pengendalian

Higgins dalam Salusu (2006:435) sasaran yang ingin dicapai oleh strategi harus dijabarkan secara rinci, maka dari itu dibuatkan perencanaan antara dan perencanaan operasional. Perencanaan antara adalah penghubung antara sasaran-sasaran strategi dan perencanaan operasional yang disebut juga program. Program ini mencakup ruang lingkup yang cukup luas, waktu yang memadai, cukup komprehensif dan memiliki rincian detail. Perencanaan operasional berlaku untuk jangka waktu satu tahun dengan tugas menerjemahkan perencanaan kedalam rencana yang pasti yaitu memberi hasil kegiatan yang diinginkan.

2) Kepemimpinan, Motivasi dan Sistem Komunikasi

Gaya kepemimpinan memegang peranan sentral dalam menggerakkan karyawan menuju sukses. Para manajer hendaknya mampu memberikan motivasi kepada jajaran kepegawaian jika ingin maju. Selain itu sistem komunikasi yang dimiliki harus baik guna mencapai tujuan yang ingin dicapai.

3) Manajemen Sumber Daya Manusia dan Kultur Organisasi

Komponen implementasi biasanya ditangani oleh bagian personalia dalam organisasi yang memiliki dua fungsi utama. Pertama, menempatkan karyawan yang sekaligus mencakup perencanaan personil, perekrutan, saringan, pelatihan dan orientasi. Kedua, berfungsi apabila karyawan sudah mulai bekerja yang mencakup pelatihan dan pengembangan, penyediaan kompensasi dan motivasi, jaminan kesehatan

dan keselamatan kerja, evaluasi dan pengendalian, perbaikan produktivitas dan perbaikan komunikasi dalam organisasi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model implementasi strategi menurut Wheelen-Hunger yang meliputi dua aspek yakni program, *budget*/anggaran dan prosedur kerja. Alasan peneliti menggunakan model implementasi strategi ini karena peneliti ingin menganalisis strategi yang digunakan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam bentuk program serta *budget*/anggaran dan prosedur kerja yang digunakan dalam menjalankan program tersebut.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Strategi

Heide dalam Heene (2010:181) menyatakan bahwa kemampuan dalam mengimplementasikan suatu strategi dengan berhasil dipengaruhi oleh tujuh faktor, yaitu;

a. Sistem informasi dari organisasi

Suatu pengimplementasian strategi yang berhasil menuntut adanya lalu lintas informasi yang relevan dan juga *continue* yang mencakup ke seluruh bagian organisasi.

b. Kemampuan proses belajar dari organisasi

Implementasi dari suatu strategi tidak saja menuntut bahwa semua partisipan harus memahami akan strategi itu, akan tetapi mereka juga harus dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk mampu mengimplementasikan strategi dengan sukses.

- c. Pengalokasian sarana-sarana organisasi secara menyeluruh
Tanpa ketersediaan sarana-sarana yang memadai termasuk sarana yang secara khusus dipersiapkan dapat dikatakan sangat sulit untuk mengimplementasikan suatu strategi dengan berhasil.
- d. Struktur organisasi yang baku
Struktur baku suatu organisasi akan berdampak secara tidak langsung terhadap implementasi dari strategi melalui dampaknya terhadap alur informasi, monitoring dan proses pengambilan keputusan di dalam organisasi.
- e. Kebijakan tentang manajemen SDM dari organisasi
Keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu strategi akan bergantung pada dedikasi para partisipan perorangan yang merasa bertanggung jawab mewujudkan strategi tersebut ke dalam realitas.
- f. Merangkul pengaruh politis di tubuh organisasi
Ketika para partisipan tertentu atau kelompok-kelompok partisipan mempersepsikan sebuah strategi sebagai sesuatu yang mereduksi kekuasaan dirinya ataupun statusnya, maka mereka akan menghambat upaya implementasi.
- g. Kultur dari organisasi
Kultur suatu organisasi mencakup keseluruhan dari sistem-sistem kognitif, nilai-nilai, maupun pola-pola perilaku yang melekat dalam organisasi. Suatu strategi yang kurang adaptif terhadap kultur organisasi akan melahirkan penolakan yang keras dan semakin menghambat segenap upaya bagi pengimplementasiannya secara efektif.

4. Indikator Keberhasilan Implementasi Strategi

Keberhasilan implementasi suatu strategi menuntut adanya upaya prakondisi terhadap segenap proses implementasinya. Seolah-olah sebelumnya perlu dipersiapkan terlebih dahulu semacam basis pertahanan bagi strategi. Menurut Beaudan dalam Heene (2010:184) sebuah strategi baru dapat diimplementasikan dengan sukses bila para manajer menaruh perhatian pada tiga tuntutan implementasinya, yaitu;

a. Kejelasan persepsi = interpretasi + penerimaan

Langkah pertama agar suatu strategi dapat dipahami bersama adalah dengan memperjelas makna dari strategi tersebut. Tanpa adanya pemahaman mendalam dari masyarakat mengenai strategi tersebut hampir tidak mungkin untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Sedangkan upaya memperjelas makna strategi terdiri dari dua proses, interpretasi dan penerimaan. Oleh karena itu, para manajer wajib menjaga agar setiap individu baik di dalam organisasi akan menginterpretasikan strategi dengan pemahaman yang sama. Di samping itu para partisipan secara individual wajib menaati strategi itu. Suatu strategi yang oleh para partisipannya dianggap kurang realistis sulit untuk berhasil dengan baik melewati tahapan transisional dari formulasi ke implementasi.

b. Keterkaitan kolektif = partisipasi + kompetensi

Langkah selanjutnya mengembangkan keterkaitan strategi dengan para partisipan orang per orang. Keterkaitan strategi organisasi ini dengan para partisipan pada awalnya menjadi pendorong munculnya partisipasi. Jadi, para partisipan perorangan yang mulai tumbuh keyakinan dirinya ini akan merasa

pula bahwa mereka memiliki kompetensi-kompetensi individual untuk mengimplementasikan strategi secara efektif dan efisien.

c. Keteguhan tekad = fleksibilitas + ritme

Dalam pengimplementasian pun menuntut hadirnya fleksibilitas dari semua jajaran organisasi. Sering munculnya ketidakterdugaan dari strategi ini menimbulkan dampak yang mempersulit kita untuk mengevaluasi seberapa besar kerja keras yang proposional yang dibutuhkan saat menjalani proses demikian sehingga akhirnya semakin mempersulit untuk menentukan ritme yang tepat.

D. Tinjauan Tentang Remaja

1. Pengertian Remaja

Masa remaja merupakan salah satu periode perkembangan manusia. Masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, psikologis dan perubahan sosial. Remaja seringkali didefinisikan sebagai periode transisi antara masa kanak-kanak ke masa dewasa atau masa usia belasan tahun atau seseorang yang menunjukkan perilaku tertentu yang sulit diatur, mudah terangsang perasaan dan sebagainya.

Menurut psikologis, remaja adalah suatu periode transisi dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa yang dimasuki pada usia kira-kira 10-12 tahun dan berakhir pada usia 18-22 tahun. Santrock (2003:26) mengungkapkan bahwa remaja merupakan masa perkembangan transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, sosial-emosional.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa remaja merupakan individu yang sedang berada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa yang ditandai dengan perubahan psikologis, biologis, kognitif dan sosial emosional.

2. Ciri-Ciri Remaja

Tahap remaja akan memberikan masa yang lebih panjang untuk mengembangkan berbagai keterampilan serta untuk mempersiapkan masa depan, akan tetapi masa itu cenderung menimbulkan masa pertentangan (konflik kemandirian). Masa remaja merupakan suatu masa perubahan baik secara fisik atau psikologis. Terdapat beberapa perubahan atau ciri-ciri yang terjadi pada masa remaja, yakni:

- a. Peningkatan emosional ini merupakan hasil dari perubahan fisik terutama hormon yang terjadi pada masa remaja, kejiwaan remaja yang tidak stabil, rasa ingin tahu yang tinggi.
- b. Perubahan yang cepat secara fisik yang juga disertai kematangan seksual. Terkadang perubahan ini membuat remaja merasa tidak yakin akan diri dan kemampuan sendiri.
- c. Perubahan yang menarik bagi dirinya dan hubungan dengan orang lain.
- d. Perubahan nilai, dimana apa yang mereka anggap penting pada masa kanak-kanak menjadi kurang penting karena sudah mendekati masa dewasa.
- e. Kebanyakan remaja bersikap ambivalen dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Disatu sisi mereka menginginkan kebebasan, tapi disisi lain mereka takut akan tanggungjawab yang menyertai kebebasan tersebut.

3. Batasan Usia Remaja

Menurut Monks dalam Sarwono (2011:12-17) suatu analisis yang cermat mengenai semua aspek perkembangan dalam masa remaja yang secara global berlangsung antara 12-21 tahun dengan pembagian;

b. Remaja Awal (12-15 tahun)

Pada masa ini remaja mengalami perubahan jasmani yang sangat pesat dan perkembangan intelektual yang sangat intensif, sehingga minat anak pada dunia luar sangat besar dan pada saat ini remaja tidak ingin dianggap kanak-kanak lagi namun belum dapat meninggalkan pola kekanak-kanakan. Selain itu, sering merasa sunyi, ragu-ragu, tidak stabil, tidak puas dan merasa kecewa.

c. Remaja Pertengahan (15-18 tahun)

Kepribadian remaja pada masa ini masih kanak-kanak tetapi pada masa remaja ini timbul unsur baru yaitu kesadaran akan kepribadian. Remaja mulai menentukan nilai-nilai tertentu dan melakukan perenungan terhadap pemikiran filosofi dan etis. Rasa percaya diri pada remaja menimbulkan kesanggupan pada dirinya untuk melakukan penilaian terhadap tingkah laku yang dilakukan. Selain itu pada masa ini remaja menemukan diri sendiri atau jati dirinya.

d. Remaja Akhir (18-21 tahun)

Pada masa ini remaja sudah mantap dan stabil. Remaja sudah mengenal dirinya dengan keberania. Remaja mulai memahami arah hidupnya dan menyadari tujuan hidupnya. Remaja sudah mempunyai pendirian tertentu berdasarkan satu pola yang jelas yang baru ditemukan.

E. Tinjauan Tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi

1. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Menurut pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional yang disingkat menjadi BNN. Badan Narkotika Nasional merupakan sebuah lembaga pemerintahan non kementerian yang berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana tertuang pada pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi

Menurut pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Ayat (2) menyatakan bahwa BNN mempunyai perwakilan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ayat (3) menyatakan BNN Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota. Menurut pasal 1 Undang-Undang Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNN Kabupaten/Kota disebutkan bahwa BNN merupakan instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah provinsi.

F. Tinjauan Tentang Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari narkoba dan obat atau bahan berbahaya. Selain narkoba istilah yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif.

1. Narkotika

Menurut pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam beberapa golongan yakni;

- a. Golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya, daya adiktif sangat tinggi yang menyebabkan ketergantungan. Contoh : ganja dan putaw.
- b. Golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat tetapi bermanfaat untuk pengobatan atau penelitian. Contoh : petidin, benzetidin, betametadol.
- c. Golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan tetapi juga bermanfaat untuk pengobatan atau penelitian. Contoh : codein

2. Psikotropika

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, psikotropika merupakan zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan

perilaku digunakan untuk mengobati gangguan jiwa. Jenis psikotropika dibagi atas 4 golongan :

- a. Golongan I adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat untuk menyebabkan ketergantungan namun belum diketahui manfaatnya. Contoh : ekstasi dan sabu-sabu.
- b. Golongan II adalah psikotropika dengan daya aktif kuat dan menyebabkan sindroma ketergantungan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : amfetamin dan metapetamin.
- c. Golongan III adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sedang dan berguna untuk pengobatan atau penelitian. Contoh : flunitrazepam.
- d. Golongan IV adalah psikotropika dengan daya aktif ringan berguna untuk pengobatan atau penelitian. Contoh : nitrazepam dan diazepam.

3. Zat Adiktif

Zat adiktif merupakan zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya seperti rokok, alkohol, tiner dan zat lainnya.

G. Peneliti Terdahulu

Beberapa peneliti terdahulu yang relevan telah menjadi inspirasi penelitian ini, sebagai referensi dalam pemilihan topik penelitian. Di antaranya yaitu :

1. Thio Sandiyuda Pratama (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Strategi Lembaga Ombudsman Perwakilan Lampung Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Studi Pada Pelaksanaan PPDB di Kota Bandar Lampung Tahun 2013). Fokus dalam penelitian ini adalah strategi yang akan dilakukan oleh Ombudsman dalam pengawasan penyelenggaraan

PPDB 2013 dengan menggunakan aspek kebijakan organisasi, motivasi serta alokasi SDM dan non SDM. Fokus penelitian ini juga menitikberatkan pada kriteria evaluasi strategi melalui konsistensi, penyesuaian diri, penciptaan nilai dan potensi diri. Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi.

2. Okki Ardita (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Strategi Lembaga Advokasi Perempuan (DAMAR) Dalam Menanggulangi Kekerasan Terhadap Perempuan. Fokus dalam penelitian ini adalah strategi yang akan dilakukan oleh Lembaga Advokasi Perempuan (DAMAR) dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dengan tujuan organisasi, struktur organisasi, program, prosedur dan alokasi sumber daya. Selain itu penelitian ini memfokuskan ada kendala yang dihadapi Lembaga Advokasi Perempuan (DAMAR) dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi.
3. Ristra Astriani (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Strategi Pemerintah Kota Metro Dalam Mewujudkan Kota Berintegritas Tinggi. Fokus dalam penelitian ini adalah strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah kota Metro dalam mewujudkan kota berintegritas tinggi dengan menggunakan teori strategi reformasi administrasi menurut Caiden meliputi privatisasi dan koproduksi, debirokratisasi, reorganisasi, manajemen publik dan value for money serta hambatan dalam pelaksanaan strategi tersebut. Tipe penelitian

dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi.

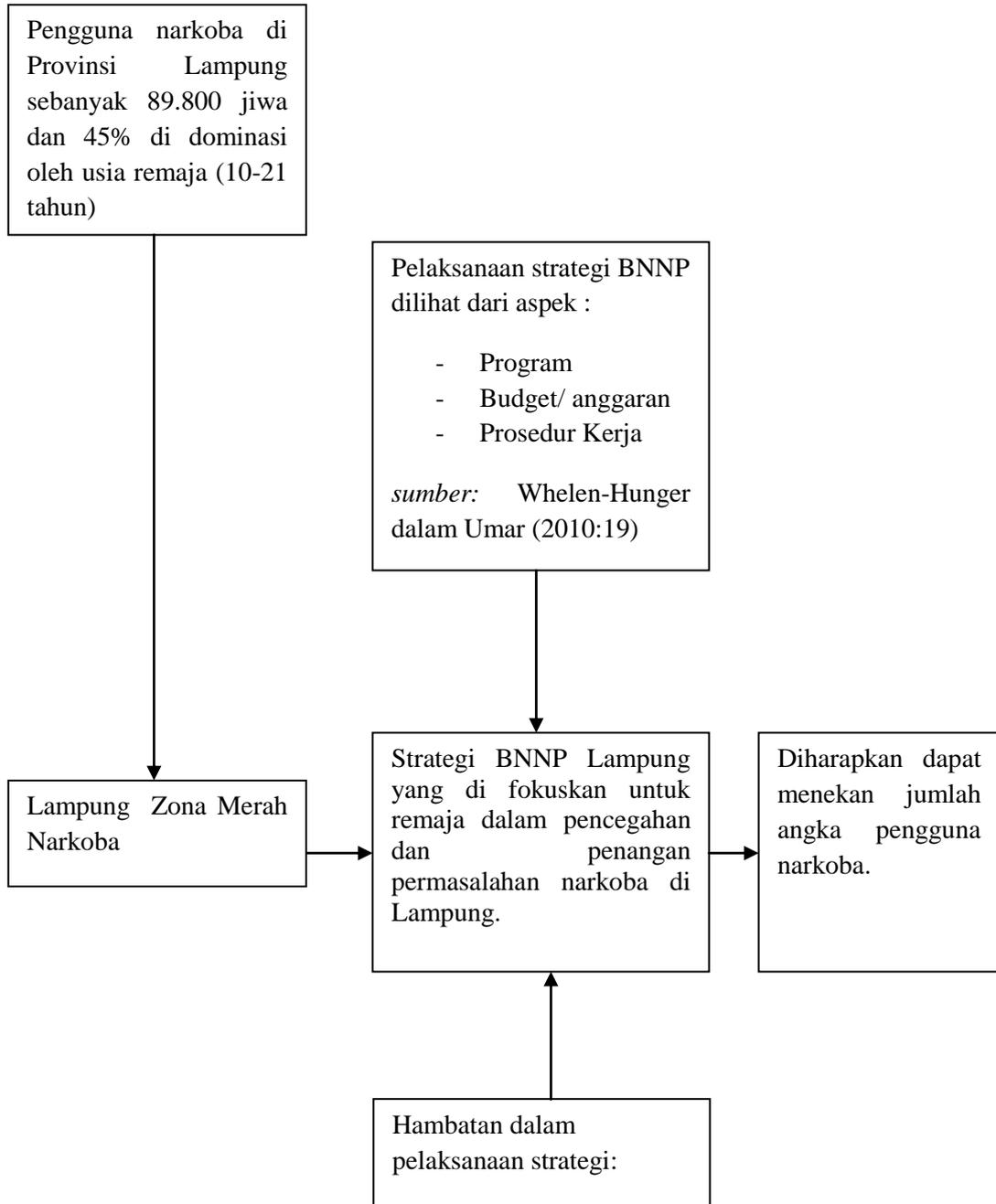
4. Dita Resti Anggraini (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Strategi Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung Dalam Mempertahankan Kinerja Organisasi. Fokus dalam penelitian ini adalah strategi yang akan dilakukan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung dalam mempertahankan kinerja organisasi yang sudah ada melalui tiga komponen yang diintegritaskan dalam proses implementasi serta hambatan dalam mempertahankan kinerja organisasi tersebut. Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi.
5. Fajrin Mustofa (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2009. Fokus dalam penelitian ini adalah strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pemberdayaan UKM melalui aspek pelaksanaan strategi pemberdayaan dan permasalahan UKM di Bandar Lampung serta faktor penghambat yang dihadapi pemerintah kota dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan UKM di Bandar Lampung. Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi.

Tabel 5. Perbedaan dan Persamaan Dengan Peneliti Terdahulu

| No. | Nama dan Tahun Penelitian | Perbedaan | Persamaan |
|------------|----------------------------------|---|---|
| 1. | Thio Sandiyuda Pratama (2014) | <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian • Teknik penelitian • Teori | <ul style="list-style-type: none"> • Berkaitan dengan strategi • Tipe penelitian • Menganalisis strategi |
| 2. | Okki Ardita (2014) | <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian • Teori • Fokus penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • Berkaitan dengan strategi • Tipe dan teknik penelitian • Menganalisis strategi dan hambatan |
| 3. | Ristra Astriani (2013) | <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian • Teori • Fokus penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • Berkaitan dengan strategi • Tipe dan teknik penelitian • Menganalisis strategi dan hambatan |
| 4. | Dita Resti Anggraini (2014) | <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian • Teori • Fokus penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • Berkaitan dengan strategi • Tipe dan teknik penelitian • Menganalisis strategi dan hambatan |
| 5. | Fajrin Mustofa (2012) | <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian • Teori • Fokus penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • Berkaitan dengan strategi • Tipe dan teknik penelitian • Menganalisis strategi dan hambatan |

Sumber: diolah peneliti 2016

H. Kerangka Fikir



Sumber : di olah peneliti, 2016

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian ini dipilih karena peneliti ingin memecahkan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang diperoleh dari observasi, wawancara serta dokumen yang berkaitan dengan strategi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung serta faktor penghambat dalam mengimplementasikan strategi guna menghadapi Lampung Zona Merah Narkoba secara sistematis dan sesuai dengan fakta yang ada dilapangan sesuai dengan pendapat Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2013:4) yang menyatakan tipe penelitian kualitatif berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, serta data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

B. Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut denganfokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Dalam penelitian kualitatif, penentuan

fokus lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang dapat diperoleh dari situasi sosial (lapangan).

Fokus dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam menghadapi Lampung Zona Merah Narkoba melalui :

1. Pelaksanaan strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam menghadapi Lampung Zona Merah Narkoba melalui aspek;
 - a. Program
 - b. *Budget* atau anggaran
 - c. Prosedur Kerja
2. Faktor penghambat dalam mengimplementasikan strategi yang akan dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung berdasarkan;
 - a. Faktor eksternal
 - b. Faktor internal

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian untuk menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Lokasi penelitian ini berada di Lampung. Lokasi ini dipilih karena mengingat Lampung sebagai salah satu provinsi yang tingkat penyalahgunaan narkoba tinggi yang mengakibatkan Lampung masuk ke dalam “zona merah” peredaran narkoba. Selain itu Lampung merupakan pintu gerbang utama Pulau Sumatera dimana Lampung menjadi akses perlintasan keluar masuk transportasi darat sehingga

kerap mengakibatkan adanya penyelundupan narkoba yang datang dari luar Pulau Sumatera.

Unit analisis penelitian ini berada di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung, JL.Griya Mustika No. 07-08 Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Peneliti memilih Badan Narkotika (BNN) Provinsi sebagai unit analisis karena BNNP Lampung merupakan sebuah badan narkotika yang menangani masalah pencegahan dan peredaran narkoba, pemberantasan narkoba serta rehabilitasi para pecandu narkoba. Selain itu BNNP Lampung yang menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010. Dengan adanya Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung diharapkan dapat membantu menekan angka penyalahgunaan narkoba di Provinsi Lampung.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka yang akan dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Teknik wawancara (*interview*)

Esterberg dalam Sugiyono (2012:317) mendefinisikan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dengan

wawancara, maka peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam mengintegrasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak dapat ditemukan melalui observasi. Informan adalah mereka yang langsung terlibat dalam pelaksanaan strategi dari Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Dalam menghadapi Lampung Zona Merah Narkoba. Informan yang dijadikan sumber informasi dalam penelitian ini adalah:

Tabel 6. Data Informan

| NO. | Nama Informan | Jabatan |
|------------|----------------------|---|
| 1. | Fhata Z'AF Al Ali | Tim penyuluh BNNP Lampung |
| 2. | Ahmad Alamsyah | Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Lampung |
| 3. | Abadi Azra'i | Kepala Bidang Rehabilitasi |
| 4. | Abdul Haris | Kepala Bidang Pemberantasan |
| 5. | Suwardi | Sub Bag Umum |
| 6. | Rohmansyah | Sub Bag Perencanaan |
| 7. | Ferniola Defina | Guru Bimbingan konseling (BK) SMA YP UNILA Bandar Lampung |
| 8. | Umi Salamah | Guru SMP Negeri 9 Bandar Lampung |
| 9. | Karmini | Guru SMA Utama II Bandar Lampung |
| 10. | Eddy Marjoni | Kepala Seksi Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat |
| 11. | Romi | Ketua RT Kelapa Tiga, Kaliawi |
| 12. | Ramadhani | Remaja |
| 13. | Aditya | Remaja |

(sumber : diolah peneliti, 2016)

2. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pengamatan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan berkaitan dengan strategi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam menghadapi Lampung Zona Merah Narkoba.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk menghimpun berbagai data sekunder dari dokumen-dokumen tertulis berupa perundang-undangan, arsip-arsip, dan foto-foto dilapangan. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai data sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung. Adapun dokumen-dokumen yang berupa berupa perundang-undangan dan arsip lainnya antara lain;

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Intruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2011-2015
- c. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang BNN,BNNP dan BNK;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Orgaisasi dan Tata Kerja Lembaga lain;

- e. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional
- f. Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
- g. Laporan Anggaran BNNP Lampung Tahun 2015
- h. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas

E. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Tresiana (2013:119-120) tahapan-tahapan analisis data adalah :

a. Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data yaitu seluruh kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Kegiatan yang telah dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan strategi yang dilakukan oleh BNNP Lampung dalam menghadapi Lampung Zona Merah Narkoba khususnya dikalangan remaja.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan proses pemilihan, pemilahan, focusing dan penyederhanaan data mentah yang ada dalam semua bentuk catatan dan dokumen lapangan. Dalam penelitian ini peneliti memilih mana data yang

dibutuhkan dalam penelitian strategi BNNP Lampung dalam menghadapi Lampung Zona Merah Narkoba khususnya dikalangan remaja.

c. Tampilan Data (*Data Display*)

Tampilan data yaitu kegiatan penyajian data atau informasi dalam bentuk yang terorganisasi dengan baik sehingga kegiatan pembuatan kesimpulan dalam bentuk narasi atas kategori dan pola tertentu menurut pandangan informan dapat dilakukan. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam wawancara dengan informan serta observasi terkait dengan strategi BNNP Lampung dalam menghadapi Lampung Zona Merah Narkoba khususnya dikalangan remaja.

d. Membuat Kesimpulan

Membuat kesimpulan yaitu kegiatan pembuatan kesimpulan dalam bentuk narasi atas kategori dan pola tertentu menurut pandangan informan. Pada penelitian ini, data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dicari pola, tema serta hal-hal yang sering muncul, yang dituangkan dalam kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data hasil penemuan di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan strategi yang dilakukan oleh BNNP Lampung dalam menghadapi Lampung Zona Merah Narkoba dengan teori-teori yang diusulkan dalam Bab Tinjauan Pustaka, serta dengan pengambilan intisari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara, serta dokumentasi.

F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut Moleong (2013:324) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria;

1. Derajat kepercayaan (*credibility*)

a. Triangulasi

Teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Sugiono (2012:273-274) mengungkapkan triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara dan waktu.

1). Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2). Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuisioner.

3). Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah maka akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi serta dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan strategi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam menghadapi Lampung zona merah narkoba.

b. Kecukupan Referensial

Kecukupan referensial yaitu, dengan memanfaatkan bahan-bahan terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan referensial peneliti melakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian baik melalui literatur buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan untuk mendukung analisis data.

c. Ketekunan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Dengan melakukan ketekunan, maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

d. Analisis kasus negatif

Teknik analisis kasus negatif dilakukan dengan cara mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai pembandingan.

2. Keteralihan (*transferability*)

Pengujian keteralihan dalam penelitian kualitatif digunakan supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut maka peneliti harus membuat laporan yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.

3. Kebergantungan (*dependability*)

Pengujian kebergantungan dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian tapi dapat memberikan data maka dari itu diperlukannya uji kebergantungan. Apabila proses penelitian tidak ada tetapi datanya ada, maka penelitian itu tidak *reliabel* atau *dependable*.

4. Kepastian (*confirmability*)

Pengujian kepastian dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian yang sudah dilakukan.

IV. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Provinsi Lampung

1. Sejarah Provinsi Lampung

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Maret 1964. Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang terdapat di Pulau Sumatera dengan luas wilayah 35.288,35 Km². Provinsi Lampung merupakan Provinsi dengan jalur distribusi yang strategis karena terletak di paling ujung pulau Sumatera dengan akses distribusi berupa selat sunda dan didukung oleh pelabuhan penyebrangan yaitu Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Panjang.

Luas perairan laut Provinsi Lampung diperkirakan lebih kurang 24.820 km (atlas sumberdaya pesisir Lampung, 1999). Panjang garis pantai Provinsi Lampung lebih kurang 1.105 km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km). Batas administrasi wilayah Provinsi Lampung adalah :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda

- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan.

Provinsi Lampung dengan Ibukota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan dari Kota Kembar Tanjungkarang dan Telukbetung memiliki wilayah yang relative luas dan menyimpan potensi kelautan. Pelabuhan utamanya bernama Panjang dan Bakauheni serta Pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan (telukbetung), Tarahan dan Kalianda di Teluk Lampung. Sedangkan di Teluk Semangka adalah Kota Agung dan laut Jawa terdapat pula Pelabuhan nelayan seperti Labuhan Maringgai dan Ketapang. Disamping itu Kota Menggala juga dapat dikunjungi kapal-kapal nelayan dengan menyusuri sungai Way Tulang Bawang, adapun Samudra Indonesia terdapat Pelabuhan Krui. Lapangan terbang utamanya adalah Radin Inten II yaitu nama baru dari Branti 28 Km dari ibukota melalui jalan Negara menuju Kotabumi dan Lapangan terbang AURI terdapat di Menggala yang bernama Astra Ksetra.

2. Visi dan Misi Provinsi Lampung

a. Visi Provinsi Lampung

Lampung Maju dan Sejahtera Tahun 2019

b. Misi Provinsi Lampung

1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah
2. Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial
3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Budaya Masyarakat, dan Toleransi Kehidupan Beragama

- 3a. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
- 3b. Transformasi Budaya Lampung dan Pementapan Toleransi Kehidupan Beragama
4. Meningkatkan Pelestarian Sumber Daya Alam dan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
5. Menegakkan Supremasi Hukum, Membangun Peradaban Demokrasi dan Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme ASN

3. Administrasi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964 Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan ibukota Tanjungkarang-Telukbetung. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 1983 telah diganti namanya menjadi Kotamadya Bandar Lampung terhitung tanggal 17 Juni 1983.

Administrasi Pemerintahan di Provinsi Lampung dibagi dalam 14 (empat belas) Kabupaten/Kota .

Tabel 7. Pembagian Wilayah Provinsi Lampung

| No. | Kabupaten/Kota | Ibukota |
|-----|-----------------|-----------------|
| 1. | Bandar Lampung | Bandar Lampung |
| 2. | Metro | Metro |
| 3. | Lampung Selatan | Kalianda |
| 4. | Lampung Tengah | Gunung Sugih |
| 5. | Lampung Timur | Sukadana |
| 6. | Lampung Utara | Kota Bumi |
| 7. | Lampung Barat | Liwa |
| 8. | Tanggamus | Kota Agung |
| 9. | Tulang Bawang | Menggala |
| 10. | Way Kanan | Blambangan Umpu |
| 11. | Pesisir Barat | Krui |

| | | |
|-----|-----------|---------------|
| 12. | Mesuji | Mesuji |
| 13. | Pringsewu | Pringsewu |
| 14. | Pesawaran | Gedong Tataan |

Sumber : <https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung> (di akses pada tanggal 14 Maret 2016)

4. Kependudukan

Kepadatan penduduk terendah di Provinsi Lampung pada tahun 2011 terdapat di Kabupaten Lampung Barat, Mesuji dan Tulang Bawang yang memiliki kepadatan masing-masing 85,86 dan 91 jiwa/km². Hal ini dipengaruhi oleh medan wilayah yang sulit untuk dijangkau serta ketersediaan prasarana dan sarana masih terbatas, sehingga menurunkan minat penduduk untuk menetap dan mencari penghidupan di sana.

Tabel 8. Jumlah Penduduk Usia Remaja Tahun 2015

| No. | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|-----|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 10-14 | 368.926 | 349.333 | 718.259 |
| 2 | 15-19 | 364.857 | 342.379 | 707.236 |
| 3 | 20-24 | 352.249 | 331.015 | 683.264 |
| 4 | Jumlah Usia Remaja | 1.086.032 | 1.022.817 | 2.108.849 |
| 5 | Total Penduduk | 4.070.935 | 3.861.197 | 7.932.132 |
| 6 | Presentase Usia Remaja | 40.70 | 38.61 | 79.32 |

Sumber : *Badan Pusat Statistik 2015*

Berdasarkan data tersebut jumlah penduduk usia remaja di tahun 2015 tercatat sebanyak 2.108.849 jiwa dari 7.932.132 seluruh jumlah penduduk Provinsi Lampung tahun 2015. Klasifikasi usia terdiri dari usia 10-14 tahun sebanyak

718.259, 15-19 tahun sebanyak 707.236 dan 20-24 tahun 683.264 sebanyak 683.264 tahun.

B. Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung (BNNP Lampung)

1. Sejarah Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung (BNNP Lampung)

Penanggulangan narkoba di Indonesia sendiri dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi enam permasalahan nasional yang menonjol, salah satunya adalah penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, Pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Badan Koordinasi Narkotika Nasional adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait. Namun BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Badan Narkotika Nasional sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaanfungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat Nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati atau Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BNN Kabupaten/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan semakin serius, maka ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997. Berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tersebut. BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. Untuk di Provinsi Lampung, telah dibentuk BNNP Lampung yang merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah provinsi.

2. Visi Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung

a. Visi

Menjadi lembaga yang profesional dan mampu berperan sebagai focal point Indonesia di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya di Wilayah Lampung.

b. Misi

1. Menyusun kebijakan Daerah tentang P4GN;
2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya;
3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah P4GN;
5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada presiden melalui BNN Republik Indonesia.

3. Tugas dan Fungsi Pokok Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)

Lampung

Badan Narkotika Nasional dalam peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional adalah lembaga non kementerian instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam Wilayah Provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Republik Indonesia secara jelas ditegaskan bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung terdiri dari:

a. Kepala Badan

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung mempunyai tugas dan wewenang untuk memimpin Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dalam wilayah Provinsi dan mewakili Kepala Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan hubungan kerjasama P4GN dengan instansi Pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi.

b. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, kemudian evaluasi, pelaporan, dan administrasi sarana prasarana Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dan dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi :

1. Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;

2. Penyiapan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana, dan urusan rumah tangga Badan Narkotika Nasional Provinsi;
3. Penyiapan pelaksanaan pengelolaan data informasi P4GN;
4. Penyiapan pelaksanaan layanan hukum dan kerja samadalam Wilayah Provinsi;
5. Penyiapan pelaksanaan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat;
6. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Badan Narkotika Nasional Provinsi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung membawahi tiga sub bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Sarana Prasarana
3. Sub Bagian Administrasi

c. Bidang Pencegahan

Bidang Pencegahan BNN Provinsi Lampung di pimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung yang mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pencegahan dan memiliki fungsi pelaksanaan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan dalam Wilayah Provinsi, pelaksanaan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam Wilayah Provinsi serta pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

d. Bidang Pemberantasan

Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung mempunyai tugas yang meliputi penyidikan, penindakan dengan cara upaya paksa (*razia*) dan upaya deteksi dini (*tes urine*) dan pengejaran dalam rangka memutus jaringan kejahatan terorganisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya dalam Wilayah Provinsi Lampung. Untuk menjalankan tugasnya Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung memiliki fungsi :

1. Pelaksanaan kegiatan Intelijen berbasis teknologi dalam wilayah provinsi;
2. Pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka memutus jaringan kejahatan terorganisir dalam wilayah provinsi;
3. Pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti dan aset dalam wilayah provinsi;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pemberantasan melalui intelijen dan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

e. Bidang Rehabilitasi

Bidang rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi agar terciptanya Indonesia bebas narkoba. Maka Badan Narkotika Nasional mengeluarkan kebijakan berupa penyelamatan para pecandu narkoba dengan melakukan rehabilitasi. Bidang rehabilitasi memiliki fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah provinsi;

2. Penyiapan pelaksanaan asesmen penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dalam wilayah provinsi;
3. Penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam wilayah provinsi;
4. Penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan pendampingan bagi mantan penyalah guna dan/atau pecandu narkotika dalam wilayah provinsi;
5. Penyiapan pelaksanaan penyatuan kembali ke dalam masyarakat dan perawatan lanjut bagi mantan penyalah guna dan/atau pecandu narkotika dalam wilayah provinsi;
6. Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang rehabilitasi kepada BNNK/ Kota dalam wilayah provinsi

Bidang rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung memiliki dua seksi :

- a. Seksi penguatan lembaga rehabilitasi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, asesmen bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

b. Seksi pascarehabilitasi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan pendampingan, penyatuan kembali ke dalam masyarakat dan perawatan lanjut, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

f. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional di BNN Provinsi Lampung mempunyai tugas:

- a. Penyuluh
- b. Penyidik

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A.KESIMPULAN

1. Pelaksanaan strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung dalam menghadapi Lampung Zona Merah Narkoba

Pelaksanaan strategi BNNP Lampung dalam menghadapi Lampung Zona Merah Narkoba (studi pada kalangan remaja) melalui beberapa program yakni sosialisasi, deteksi urin, satgas anti narkoba dan rehabilitasi. Program sosialisasi meliputi kegiatan penyuluhan dan pelatihan serta aksi simpatik yang dilakukan BNNP Lampung. Deteksi urin bertujuan untuk menjaring pecandu, penyalahguna atau korban penyalahguna narkoba. Pembentukan satgas anti narkoba di lingkungan pendidikandengan memilih beberapa remaja untuk dijadikan sebagai duta narkoba yang memiliki rasa peduli terhadap penggunaan narkoba dikalangan remaja, sehingga mereka dapat membantu BNNP Lampung dalam mengkampanyekan anti narkoba ini. Sedangkan rehabilitasi merupakan upaya menyelamatkan para pengguna narkoba dari belunggu narkoba melalui Gerakan Rehabilitas 100.000 Pecandu Narkoba. Namun, program-program tersebut dianggap belum efektif karena belum mampu menjangkau keseluruhan kalangan remaja sehingga membuat angka pengguna narkoba setiap tahunnya masih meningkat. Alokasi anggaran yang diberikan kepada BNNP Lampung bersumber dari dana APBN. Namun, BNNP

Lampung belum mampu memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan. Dalam pelaksanaan strateginya BNNP Lampung memiliki prosedur kerja yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2007. Namun, dari program-program yang dijalankan BNNP Lampung masih belum efektif karena jumlah penyalahgunaan narkoba di Provinsi Lampung masih meningkat dan didominasi oleh remaja.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung Dalam menghadapi Lampung Zona Merah Narkoba (Studi Pada Kalangan Remaja)

Beberapa hambatan baik internal maupun eksternal yang menjadi faktor penghambat BNNP Lampung dalam menjalankan program yaitu kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh BNNP Lampung, kurangnya dana anggaran terutama pada program rehabilitasi serta partisipasi masyarakat untuk ikut berperan dalam program yang dijalankan oleh BNNP Lampung.

A. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan dalam Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung Dalam Menghadapi Indonesia Darurat Narkoba adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya upaya penanggulangan bahaya narkoba tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, akan tetapi juga dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan strategi BNNP Lampung.

2. Hendaknya BNNP Lampung melakukan pemetaan terhadap daerah rawan narkoba serta memperluas sosialisasi dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak lain seperti pihak sekolah, tokoh masyarakat, LSM dan lembaga lain yang berkaitan dengan penanggulangan pemberantasan narkoba.
3. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba harus lebih ditingkatkan serta frekuensi waktu sosialisasi sehingga mempercepat tingkat kesadaran masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba.
4. Hendaknya melakukan kegiatan nyata dari pembentukan kader anti narkoba lebih ditingkatkan lagi seperti membuat kegiatan seni yang melibatkan para remaja untuk membuat generasi muda yang lebih aktif, sehat dan positif.
5. Penambahan dana dan sumber daya manusia (sdm) dalam pelaksanaan program BNNP Lampung karena pada saat ini sumber daya yang dimiliki tidak memadai. BNNP Lampung dapat melakukan kerjasama dengan pihak relawan, LSM, lingkungan maupun sekolah untuk merekrut tenaga kerja sosial yang dapat membantu BNNP Lampung dalam melaksanakan strateginya.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Akdon.2011. *Strategic Management For Education Management (Manajemen Strategik untuk Manajemen Pendidikan)*. Bandung : Alfabeta
- Amir, Taufiq.2011.*Manajemen Strategik (Konsep dan Aplikasi)*.Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA
- Amirullah.2015. *Manajemen Strategi (Teori-Konsep-Kinerja)*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Assauri, Sofjan. 2013. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA
- David, Fred R. 2004. *Strategic Management :Konsep Manajemen Strategi*.Jakarta: Salemba Empat
- Dess, Gregory G dan Alex Miller.1993.*Strategic Management*.Singapore : McGraw-Hill
- Heene, Aime, dkk. 2010. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. Bandung : Refika Aditama
- Jauch, L. & W. Glueck. 1994. *Manajemen Strategis Kebijakan Perusahaan*. Jakarta : Gelora Aksara Pratama
- Moleong J, Lexy.2013. *Metode Penelitian Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset
- Nawawi, Hadari. 2012. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan (Dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan)*. Yogyakarta : Gajah Mada
- Santrock W, J. 2013. *Adolecent, Perkembangan Remaja*.Jakarta : Erlangga
- Sarwono S,W. 2011. *Psikologi Remaja*. Jakarta : PT Raja Grafindo
- Salusu, J. 2006. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*.Jakarta : PT Gramedia Widiasama Indonesia

- Siagian P,Sondang. 2007. *Manajemen Strategik*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Sugiyono.2012. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Syamsi, Ibnu. 2004. *Efisiensi, System dan Prosedur Kerja*.Jakarta : PT Bumi Aksara
- Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Lembaga Penelitian*. Lampung : Universitas Lampung

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- Undang-Undang Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNN Kabupaten/Kota
- Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang BNN, BNNP dan BNK
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain

Jurnal

- Anggraini, Dita Resti. 2014. *Strategi Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung Dalam Mempertahankan Kinerja Organisasi*.Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Ardita, Okki. 2014. *Strategi Lembaga Advokasi Perempuan (DAMAR) Dalam Menanggulangi Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Bandar Lampung*.Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Astriani,Ristra. 2013. *Strategi Pemerintah Kota Metro Dalam Mewujudka Berintegritas Tinggi*.Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Mustofa, Fajrin. 2012. *Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Dan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2009*.Bandar Lampung: Universitas Lampung

Pratama, Thio Sandiyuda. 2014. *Strategi Lembaga Ombudsman Perwakilan Lampung Dalam Mengawasi Penyelenggaraan PPDB Di Bandar Lampung Tahun 2013*. Bandar Lampung: Universitas Lampung

Website

www.bnnplampung.com